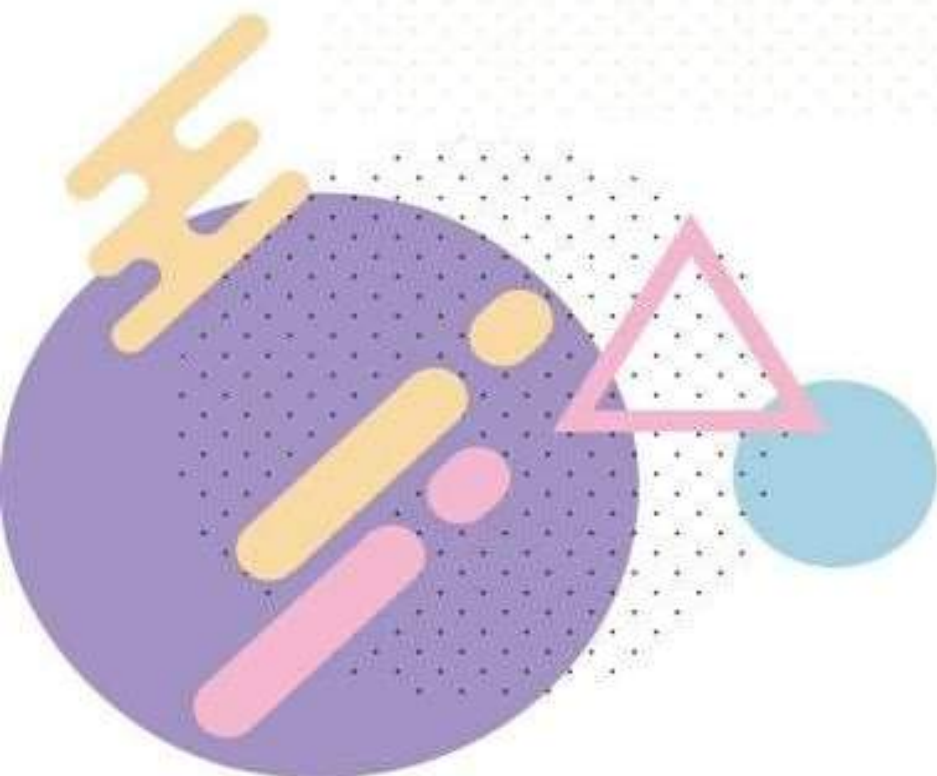


LAPORAN KEGIATAN

Trainers Convention Dalam Rangka
Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Penyelesaian Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024

Bogor, 25 s.d. 28 Januari 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan *Trainers Convention* Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diselenggarakan secara *offline* atau luring di Bigland Hotel Int'l & Convention Hall. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui peningkatan kualitas narasumber, fasilitator, bahan ajar, dan strategi pembelajaran..

Kegiatan ini dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan. Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para calon *trainers* Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat lebih meningkatkan kualitasnya..

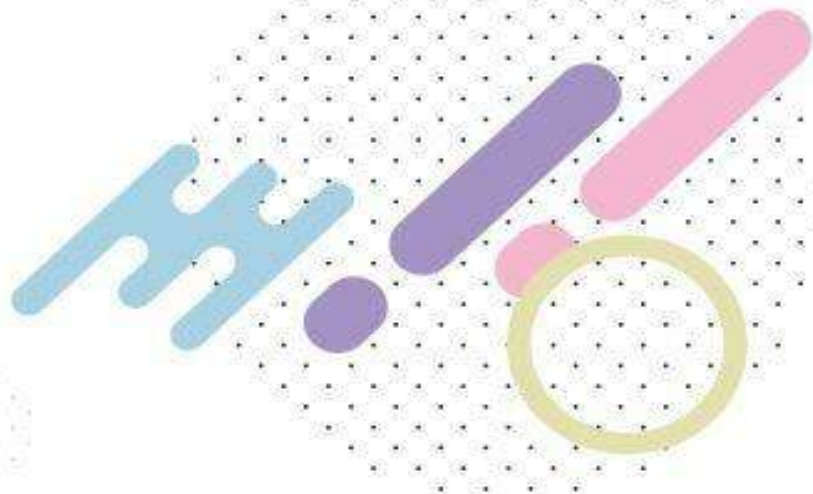
Akhir kata, demikian laporan kegiatan *Trainers Convention* Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

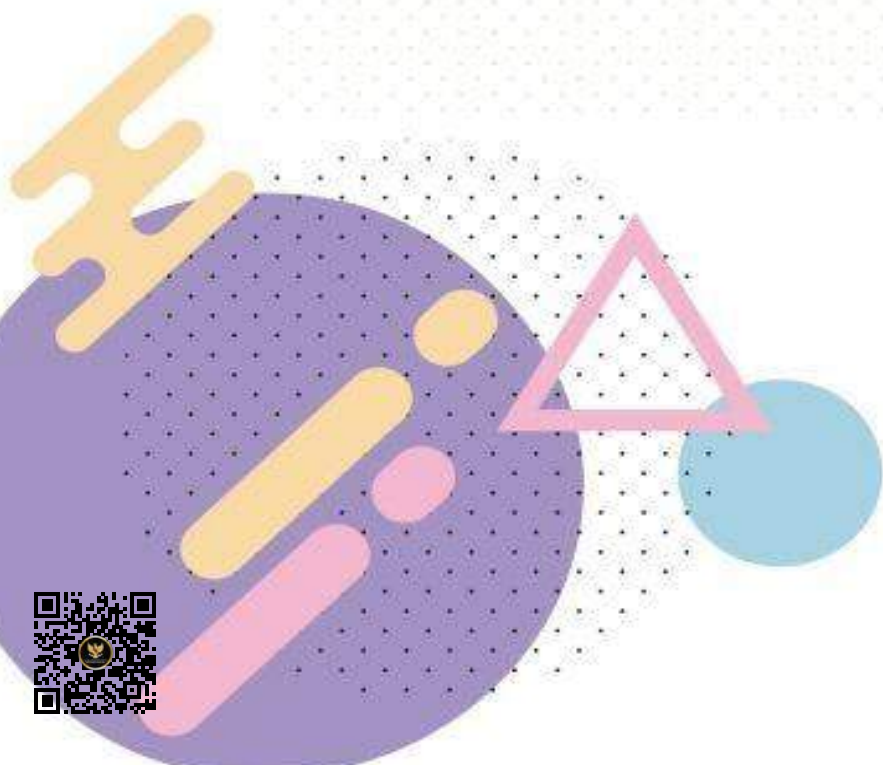
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	4
B.1. Nama Kegiatan	4
B.2. Waktu dan Tempat	4
B.3. Peserta Kegiatan.....	4
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....	4
B.5. Uraian Kegiatan	4
B.5.1. Penyelenggaraan Kegiatan.....	4
B.5.2. Acara Pembukaan.....	5
B.5.3. Penyampaian Materi	5
B.5.4. Acara Penutupan	6
C. HAMBATAN	6
D. PEMBIAYAAN	6
E. PENUTUP	7
F. LAMPIRAN	8

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Laporan Keuangan**
- 3. Jadwal Kegiatan**
- 4. Materi**
- 5. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 6. Surat Tugas**



TRAINERS CONVENTION
DALAM RANGKA PERSIAPAN
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
HUKUM ACARA PENYELESAIAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PELAKSANAAN KEGIATAN

Trainers Convention

**Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**

Rabu s.d. Sabtu, 25 s.d. 28 Januari 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selaku penyelenggara bimbingan teknis ini perlu mengembangkan keseluruhan komponen pendidikan mulai dari



substansi materi, kurikulum, narasumber, fasilitator, bahan ajar, metodologi dan strategi pembelajaran, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya sehingga tujuan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat pencari keadilan mengenai hukum acara, mekanisme, tahapan, jadwal, dan kemampuan penyusunan permohonan, keterangan pihak terkait, keterangan termohon, keterangan bawaslu, serta kemampuan memanfaatkan sistem informasi penanganan perkara yang berbasis teknologi informasi pemanfaatannya dapat semakin maksimal.

Atas dasar pemikiran di atas, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan *Trainers Convention* Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. *Trainers Convention* diharapkan menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas narasumber, fasilitator, substansi materi, kurikulum, bahan ajar, metodologi, dan strategi pembelajaran di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Selain itu, adanya kesamaan visi dan misi antara Pusdik Pancasila dan Konstitusi dengan para calon pengajar dalam mencapai sasaran pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi, sehingga kompetensi dan pemahaman peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi semakin meningkat.

A.2 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan kegiatan *Trainers Convention* Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui peningkatan kualitas narasumber, fasilitator, bahan ajar, dan strategi pembelajaran.



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“*Trainers Convention* Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Rabu s.d. Sabtu, 25 s.d. 28 Januari 2023 secara luring atau *offline* di Bigland Hotel Int’l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 125 orang yang terdiri dari calon narasumber dan moderator/fasilitator pada kegiatan Bimbingan Teknis di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

Peserta mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- 1) Tas;
- 2) Tumbler;
- 3) *USB flashdisk pen laser pointer*;
- 4) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
- 5) E-sertifikat.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *offline* atau luring di Bigland Hotel Int’l & Convention Hall. Peserta diwajibkan hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai dengan mengisi daftar hadir melalui scan barcode yang telah disediakan oleh panitia.



B.5.2. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada pukul 16.30 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam Margono, menyampaikan laporannya. Adapun susunan acara yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, mars MK, laporan Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, ceramah kunci dan pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.3. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri dari Hakim Mahkamah Konstitusi, *Managing Director AIDA Consultant*, dan beberapa ahli di internal Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
2.	Sosialisasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu Tahun 2024	1. KPU RI: Andi Krisna, S.Sos., M.M. 2. Bawaslu RI: Totok Hariyono SH
3.	<i>Public Speaking</i>	Managing Director AIDA Consultant Mohamad Soleh, S.Psi, MM, CNLP, CRGP
4.	Penyampaian Kurikulum Bimbingan Teknis PHPU	1. Imam Margono 2. Nanang Subekti
5.	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	1. YM Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. 2. YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



NO.	MATERI	NARASUMBER
6.	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD	YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
7.	Sosialisasi PMK Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU	1. Plt Sekretaris Jenderal MK 2. Panitera MK
8.	Pembahasan Teknis dan Bahan Penyelenggaraan Bimtek	Fasilitator

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi. Sesi diskusi atau tanya jawab ini dipandu oleh moderator. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung di Grand Ballroom hotel kepada narasumber. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi narasumber telah disiapkan oleh panitia berupa *slide powerpoint*. Materi narasumber juga diberikan kepada peserta melalui WA group.

B.5.4. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 08.00 WIB pada hari Sabtu, 28 Januari 2023 oleh Plt Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

C. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia yaitu penyelenggaraan kegiatan TC kurang berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak semua peserta mengikuti seluruh sesi materi. Beberapa peserta harus meninggalkan hotel karena bertugas untuk mendukung persidangan Mahkamah Konstitusi di Jakarta.

D. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2023 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC. 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 689.913.373 (enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).



E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth
NIP. 19640906 198603 2 004

Bogor, 01 Maret 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Kegiatan dibuka secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. dan dihadiri oleh Panitera Mahkamah Konstitusi, Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD oleh YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.



Penyampaian materi Sosialisasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 oleh KPU RI dan Bawaslu RI.



Penyampaian materi *Public Speaking* oleh Bapak Mohamad Soleh, S.Psi, MM, CNLP, CRGP.



Penyampaian materi Penyampaian Kurikulum Bimbingan Teknis PHPU oleh Bapak Imam Margono dan Bapak Nanang Subekti.



Penyampaian materi Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh YM Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. dan YM Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Penyampaian materi Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD oleh YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. dan materi Sosialisasi PMK Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU oleh Bapak Muhidin dan Bapak Heru Setiawan.



Penyampaian materi Pembahasan Teknis dan Bahan Penyelenggaraan Bimtek oleh fasilitator.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt. Sekretaris Jenderal MK dan dihadiri oleh Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi serta seluruh peserta.



Foto bersama peserta kegiatan *Trainers Convention* Dalam Rangka Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

LAPORAN KEUANGAN**Trainers Convention bagi Calon Narasumber Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Muhidin dkk 24 orang	Biaya Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi Persiapan di Pusdik tanggal 12-13 Januari 2023.	Rp 14,848,739
2	Muhidin dkk 123 orang	Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan tanggal 25-28 Januari 2023	Rp 142,087,065
3	PT Kirana Mitra Utama Perkasa	Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Persiapan di Pusdik tanggal 12-13 Januari 2023.	Rp 9,030,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan di Pusdik tanggal 12-13 Januari 2023.	Rp 4,981,680
5	CV Telaga Jati Abadi	Biaya Cetak dan Pasang Backdrop dengan rangka ukuran 360 cm x 700cm	Rp 9,435,000
6	Totok Hariyono dkk	Honor narasumber	Rp 6,200,000
7	Anwar Usman dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narsum	Rp 3,680,000
8	PT Buana Botani Elok	Pembayaran Belanja Pengadaan Paket meeting, Akomodasi dan Konsumsi	Rp 356,870,000
9	Pretty Litle Corkcicle	Biaya Pengadaan Seminar kit Panitia	Rp 9,724,000
10	Koperasi Konstitusi	Biaya Pengadaan Seminar Kit Peserta	Rp 123,146,175
11	PT Aida Infini Maksima	Biaya pelaksanaan Trainer Development : Public Speaking	Rp 9,910,714
TOTAL			689,913,373

JADWAL KEGIATAN *TRAINERS CONVENTION*

Hari, Tanggal : Rabu s.d. Sabtu, 25 s.d. 28 Januari 2023

Lokasi : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA	<i>Dress Code / Pakaian: Batik</i>			
Rabu, 25 Januari 2023	14.00 – 15.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Penyelenggara	Grand Ballroom Lantai PL
	15.00 – 16.30 WIB	Istirahat		
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Grand Ballroom Lantai PL
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Penyelenggara	

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi II: Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD Tahun 2024	Narasumber: 1. YM Dr. Suhartoyo 2. YM Prof. Saldi Isra Moderator: Pan M. Faiz	Grand Ballroom Lantai PL
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA	<i>Dress Code / Pakaian: Bebas Rapi</i>			
Kamis, 26 Januari 2023	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan		Restoran Lantai PL
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi III: Sosialisasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu Tahun 2024	Narasumber: 1. KPU 2. Bawaslu Moderator: Ardiansyah Salim	Grand Ballroom Lantai PL
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi IV: <i>Public Speaking</i>	Managing Director AIDA Consultant Mohamad Soleh, S.Psi, MM, CNLP, CRGP	Grand Ballroom Lantai PL
	12.00 – 13.30 WIB	ISHOMA	Penyelenggara	

	13.30 – 15.30 WIB	Sesi V: Penyampaian Kurikulum Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024	Narasumber: 1. Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 2. Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	Grand Ballroom Lantai PL
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Penyelenggara	
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi VII: Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	Narasumber: 1. YM Prof. Arief Hidayat 2. YM Prof. M. Guntur Hamzah Moderator: PM II - Dr. Wiryanto	Grand Ballroom Lantai PL
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA	<i>Dress Code / Pakaian: Bebas Rapi</i>			
Jumat, 27 Januari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Sarapan		Restoran Lantai PL
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VIII: Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Tahun 2024	Narasumber: YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh Moderator: PM I - Triyono Edy Budhiarto	Grand Ballroom Lantai PL
	09.30 – 09.45 WIB	<i>Coffee Break</i>		

	09.45 – 11.45 WIB	Sesi IX: Sosialisasi PMK Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara PPHU Tahun 2024	Narasumber: 1. Panitera 2. Plt. Sekretaris Jenderal	Grand Ballroom Lantai PL
	11.45 – 13.30 WIB	ISHOMA	Penyelenggara	
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi X: Pembahasan Teknis dan Bahan Penyelenggaraan Bimtek	Narasumber: 1. Mardian Wibowo 2. Syukri Asy'ari 3. M. Mahrus Ali	Grand Ballroom Lantai PL
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 17.00 WIB	Sesi XI: Lanjutan Pembahasan Teknis dan Bahan Penyelenggaraan Bimtek	Narasumber: 1. Mardian Wibowo 2. Syukri Asy'ari 3. M. Mahrus Ali	Grand Ballroom Lantai PL
	17.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT	<i>Dress Code / Pakaian: Bebas Rapi</i>			
Sabtu, 28 Januari 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan		
	08.00 – 10.00 WIB	Penutupan 1. Laporan Plt. Kapusdik 2. Sambutan Penutupan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 3. Pembacaan Doa	Plt. Sekretaris Jenderal Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Grand Ballroom Lantai PL

	10.00 – 12.00 WIB	<i>Check out</i>		
--	-------------------	------------------	--	--

INDEKS KERAWANAN PEMILU

PEMILU DAN PEMILIHAN
SERENTAK 2024



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

LATAR BELAKANG

Amanat UUD RI Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1) butir a:

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”

Amanat UU No 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) butir a:

“Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu, Bawaslu bertugas: Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu”



DEFINISI DAN TUJUAN

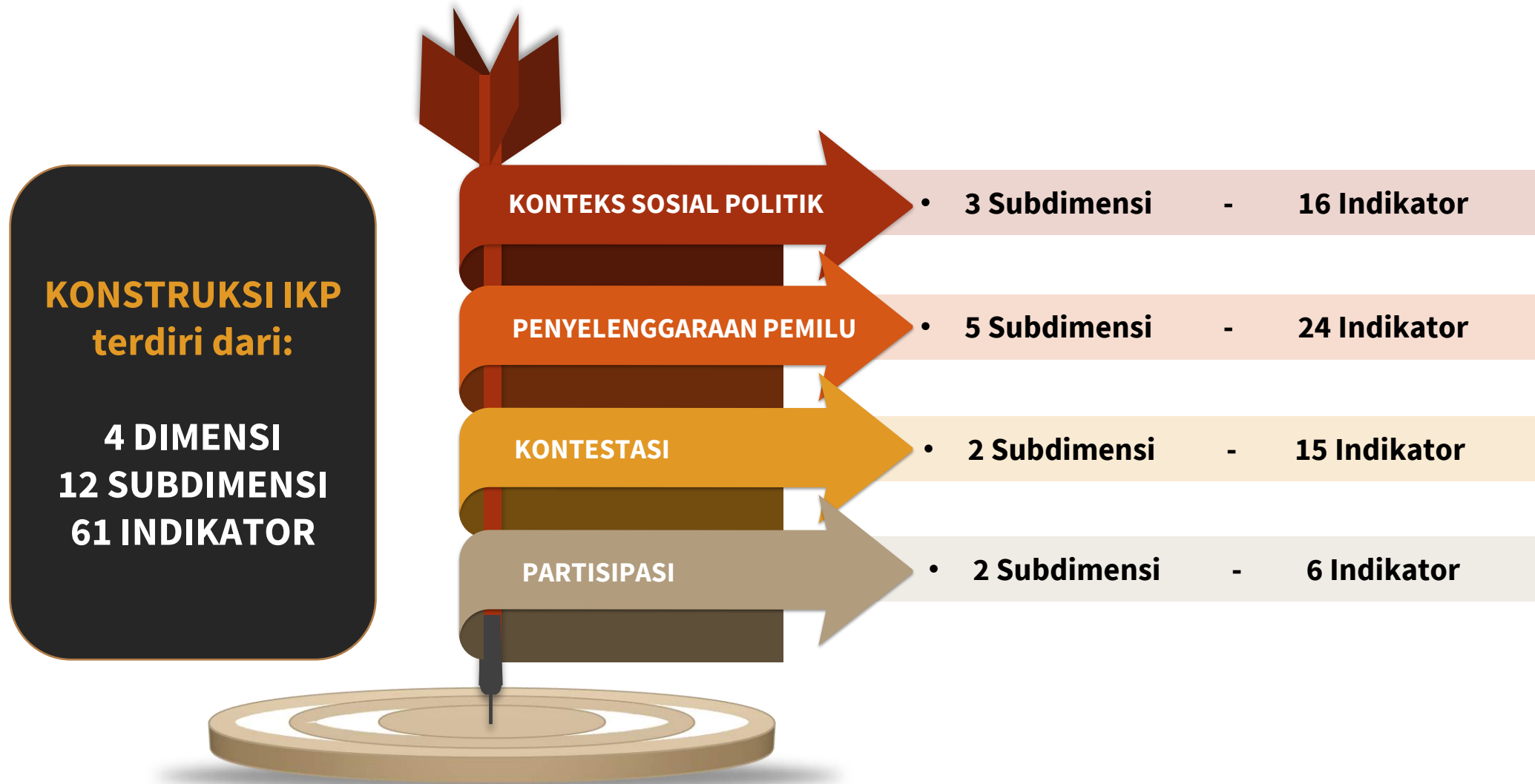
DEFINISI KERAWANAN PEMILU:

Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis.

TUJUAN:

1. Memetakan Potensi Kerawanan di 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota
2. Melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan.
3. Menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu dan pemilihan.

KONSTRUKSI IKP



DIMENSI DAN SUB DIMENSI IKP



KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

- Keamanan
- Otoritas Penyelenggara Pemilu
- Otoritas Penyelenggara Negara



PENYELENGGARAAN PEMILU

- Hak Memilih,
- Pelaksanaan Kampanye,
- Pelaksanaan Pemungutan Suara,
- Ajudikasi dan Keberatan Pemilu,
- Pengawasan Pemilu



KONTESTASI

- Hak Dipilih,
- Kampanye Calon



PARTISIPASI

- Partisipasi Memilih,
- Partisipasi Kelompok Masyarakat

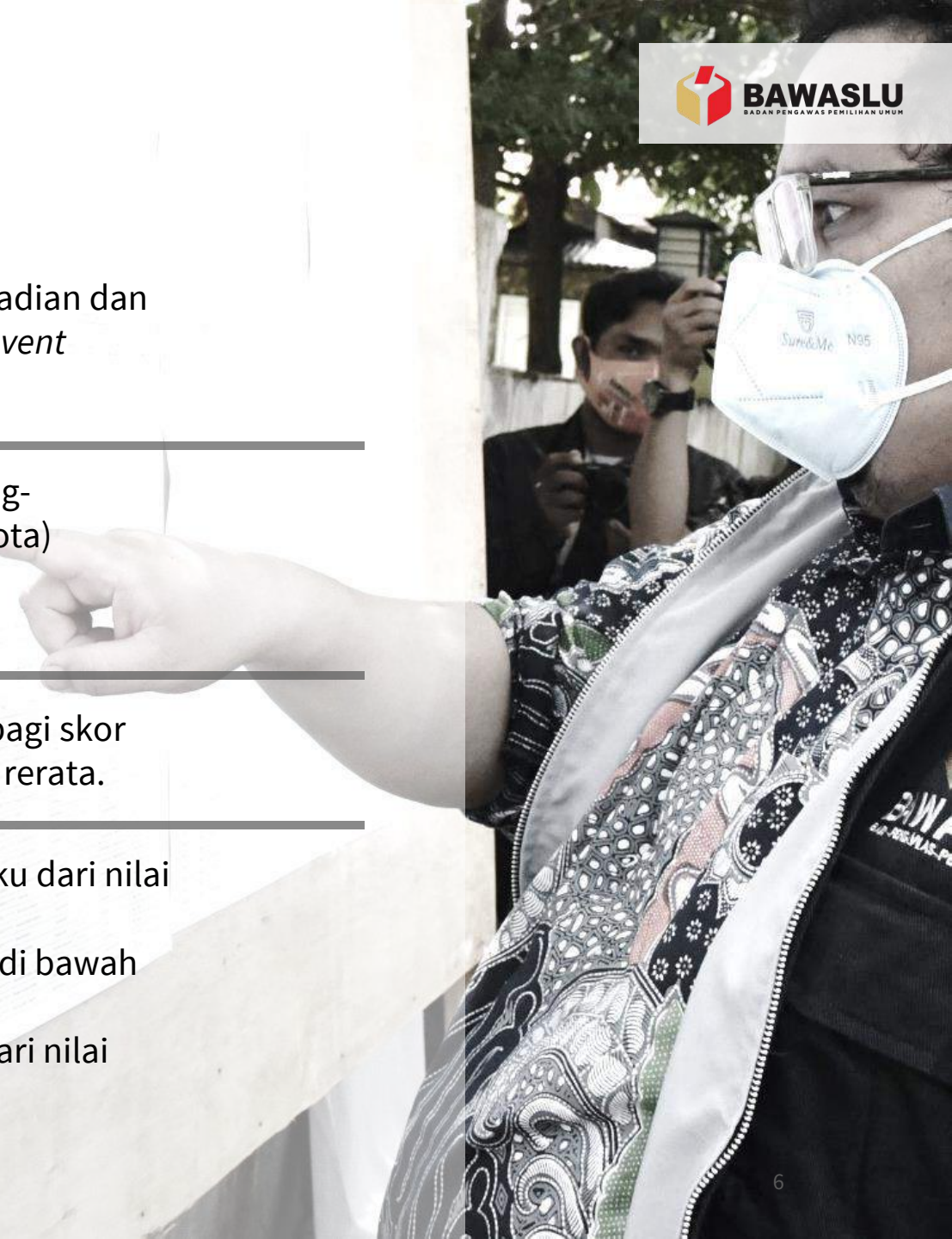
METODOLOGI

IKP dikonstruksi dari 61 indikator. Setiap indikator mengukur jumlah kejadian dan tingkat kejadian. Nilai setiap indikator dihitung dengan menjumlahkan *event* kejadian yang dibobot dengan tingkat kejadian.

Indikator penyusun dimensi diaggregasi untuk mendapatkan skor masing-masing dimensi. Skor akhir IKP untuk setiap daerah (Provinsi dan Kab/Kota) dihitung dengan menjumlahkan skor masing-masing dimensi yang telah dibobot dengan kontribusi dari dimensi-dimensi.

Kategorisasi untuk skor IKP dan skor per dimensi dihitung dengan membagi skor menjadi tiga bagian besar dengan *cut-off* satu simpangan baku dari nilai rerata.

- Skor dianggap rendah jika skor berada di bawah satu simpangan baku dari nilai rerata nasional variable.
- Skor dianggap sedang jika skor berada antara satu simpangan baku di bawah dan di atas rerata nasional.
- Skor dianggap tinggi jika skor berada di atas satu simpangan baku dari nilai rerata nasional.





INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP) TINGKAT PROVINSI

TENTANG IKP PROVINSI

Ada dua analisa IKP Provinsi: berdasarkan hasil input data dari Bawaslu provinsi dan berdasarkan hasil agregat penghitungan kabupaten/kota

Berdasarkan hasil input data Bawaslu Provinsi merupakan data yang memang menunjukkan proses pemilu/pilkada di tingkat provinsi serta kewenangan yang dimiliki

Berdasarkan hasil agregat penghitungan kab/kota merupakan hasil yang diperoleh dari data input yang berasal dari kab/kota

TINGKAT IKP PROVINSI (RAWAN TINGGI)

**RAWAN
TINGGI :**

**5 Provinsi
(15 Persen)**



1
DKI Jakarta
(88,95)



2
Sulawesi
Utara
(87,48)



3
Maluku Utara
(84,86)



4
Jawa Barat
(77,04)



5
Kalimantan
Timur
(77,04)

TINGKAT IKP PROVINSI (RAWAN SEDANG)

RAWAN SEDANG :

21 Provinsi
(62 Persen)

NO	PROVINSI	SKOR IKP
1	BANTEN	66.53
2	LAMPUNG	64.61
3	RIAU	62.59
4	PAPUA	57.27
5	NUSA TENGGARA TIMUR	56.75
6	SUMATERA UTARA	55.43
7	MALUKU	53.69
8	PAPUA BARAT	53.48
9	KALIMANTAN SELATAN	53.35
10	SULAWESI TENGAH	52.90
11	BALI	52.75

NO	PROVINSI	SKOR IKP
12	GORONTALO	45.44
13	SULAWESI BARAT	43.44
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	43.02
15	KEPULAUAN RIAU	40.33
16	SUMATERA BARAT	39.68
17	SULAWESI TENGGARA	38.32
18	ACEH	38.06
19	SUMATERA SELATAN	35.07
20	JAWA TENGAH	34.83
21	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	29.89

TINGKAT IKP PROVINSI (RAWAN RENDAH)

RAWAN RENDAH :

8 Provinsi
(24 Persen)

NO	PROVINSI	SKOR IKP
1	KALIMANTAN UTARA	20.36
2	KALIMANTAN TENGAH	18.77
3	JAWA TIMUR	14.74
4	KALIMANTAN BARAT	12.69
5	JAMBI	12.03
6	NUSA TENGGARA BARAT	11.09
7	SULAWESI SELATAN	10.20
8	BENGKULU	3.79

KERAWANAN PROVINSI PER DIMENSI IKP



KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

- Tinggi : 5 Provinsi (14.71%)
- Sedang : 22 Provinsi (64.71%)
- Rendah : 7 Provinsi (20.59%)



PENYELENGGARAAN PEMILU

- Tinggi : 6 Provinsi (17.65%)
- Sedang : 20 Provinsi (58.82%)
- Rendah : 8 Provinsi (23.53%)



KONTESTASI

- Tinggi : 6 Provinsi (17.65%)
- Sedang : 19 Provinsi (55.88%)
- Rendah : 9 Provinsi (26.47%)



PARTISIPASI

- Tinggi : 6 Provinsi (17.65%)
- Sedang : 28 Provinsi (82.35%)
- Rendah : 0 Provinsi (0 %)

10 PROVINSI RAWAN TINGGI PER DIMENSI IKP



KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

- Maluku Utara (100)
- Sulawesi Utara (89,58)
- Papua (80,53)
- DKI Jakarta (78,27)
- Yogyakarta (75,87)
- Jawa Barat (74,91)
- Kalimantan Timur (72,70)
- Sumatera Utara (72,61)
- Papua Barat (72,33)
- Kalimantan Selatan (66,96)



PENYELENGGARAAN PEMILU

- Kalimantan Timur (100)
- Sumatera Utara (94,29)
- DKI Jakarta (92,36)
- Jawa Tengah (91,67)
- Sulawesi Utara (91,60)
- Banten (89,43)
- Maluku Utara (86,48)
- Jawa barat (83,38)
- Lampung (81,13)
- Sulawesi Tenggara (80,48)



KONTESTASI

- Maluku Utara (100)
- DKI Jakarta (96,09)
- Lampung (89,30)
- Jawa Barat (83,71)
- Bangka Belitung (79,10)
- Sulawesi Utara (73,96)
- Bali (71,32)
- Nusa Tenggara Timur (68,96)
- Gorontalo (65,65)
- Riau (62,96)

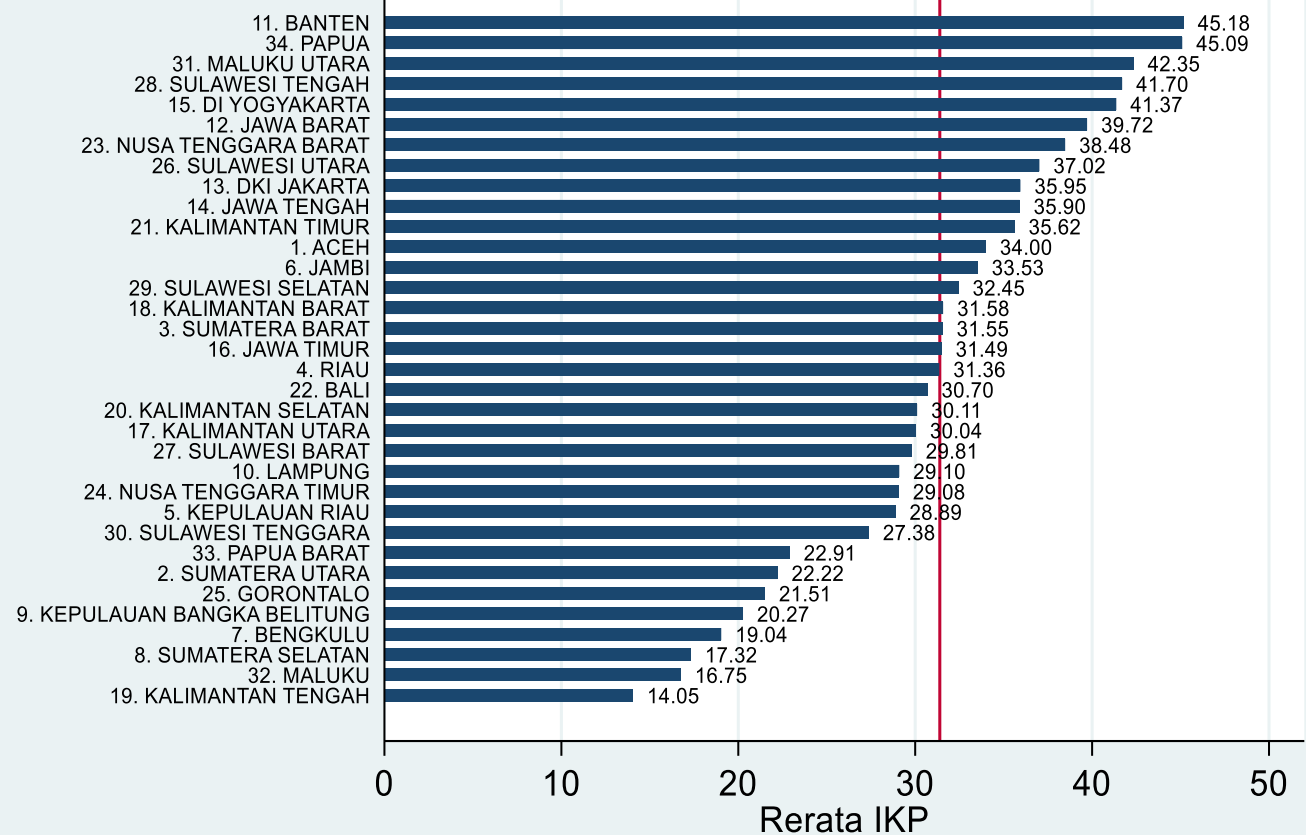


PARTISIPASI

- Sulawesi Utara (100)
- DKI Jakarta (87,01)
- Yogyakarta (87,01)
- Kepulauan Riau (87,01)
- Sulawesi Tengah (87,01)
- Papua (64,72)
- Jawa barat (42,07)
- Kalimantan Timur (30,92)

IKP PROVINSI TERTINGGI BERDASARKAN AGREGASI KAB/KOTA

1. Banten
2. Papua
3. Maluku Utara
4. Sulawesi Tengah
5. D.I. Yogyakarta
6. Jawa Barat
7. Nusa Tenggara Barat
8. Sulawesi Utara
9. DKI Jakarta
10. Jawa Tengah

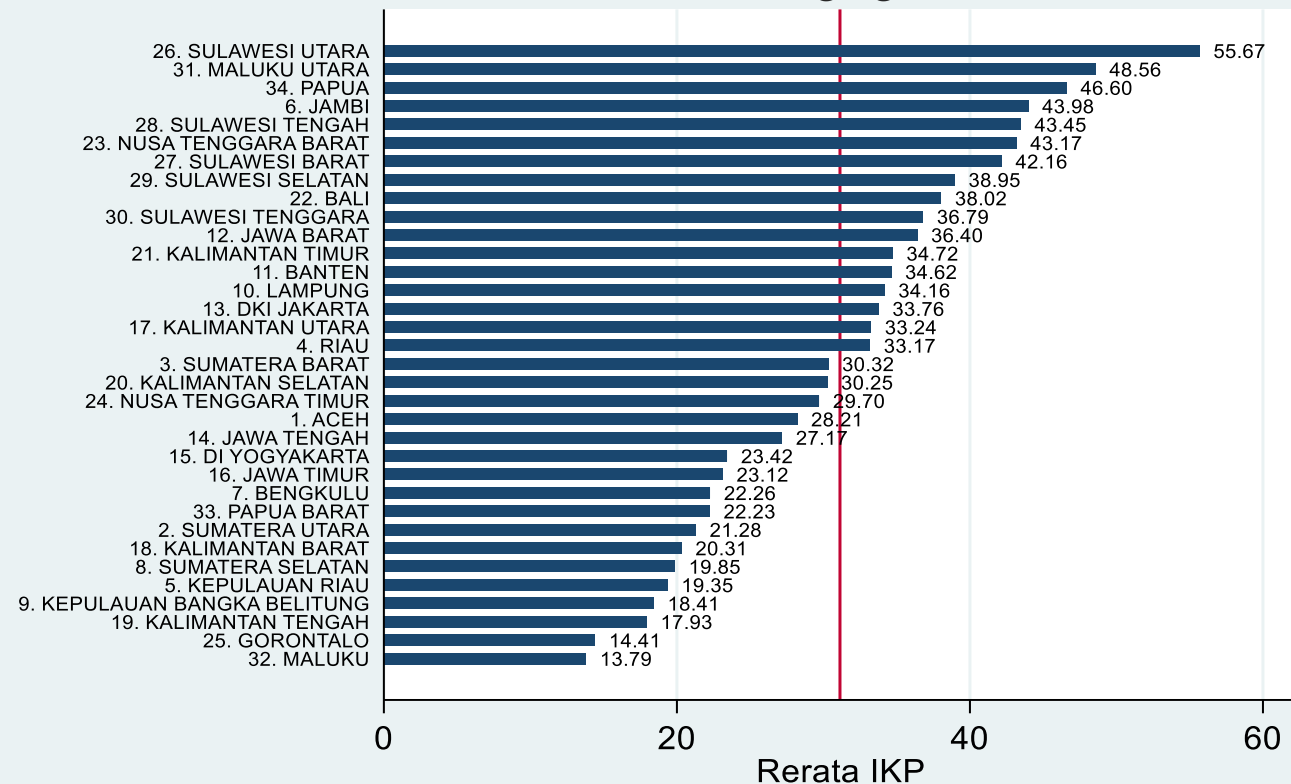


IKP PROVINSI TERTINGGI

DIMENSI SOSIAL POLITIK

1. Sulawesi Utara
2. Maluku Utara
3. Papua
4. Jambi
5. Sulawesi Tengah
6. Nusa Tenggara Barat
7. Sulawesi Barat
8. Sulawesi Selatan
9. Bali
10. Sulawesi Tenggara

IKP Dimensi Sosial Politik 2024
Berdasarkan Agregasi Kab/Kota

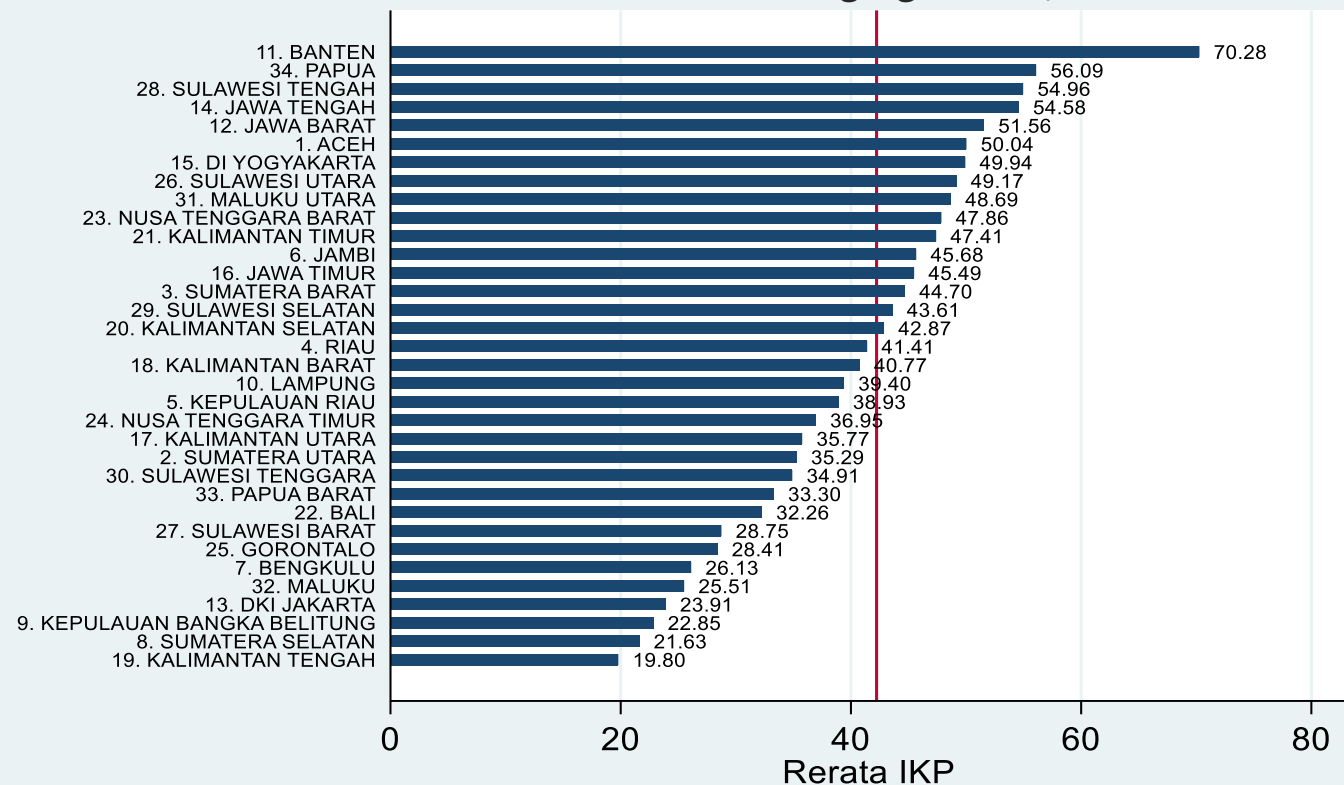


IKP PROVINSI TERTINGGI

DIMENSI PENYELENGGARAAN PEMILU

1. Banten
2. Papua
3. Sulawesi Tengah
4. Jawa Tengah
5. Jawa Barat
6. Aceh
7. DI. Yogyakarta
8. Sulawesi Utara
9. Maluku Utara
10. Nusa Tenggara Barat

IKP Dimensi Penyelenggaraan Pemilu 2024
Berdasarkan Agregasi Kab/Kota

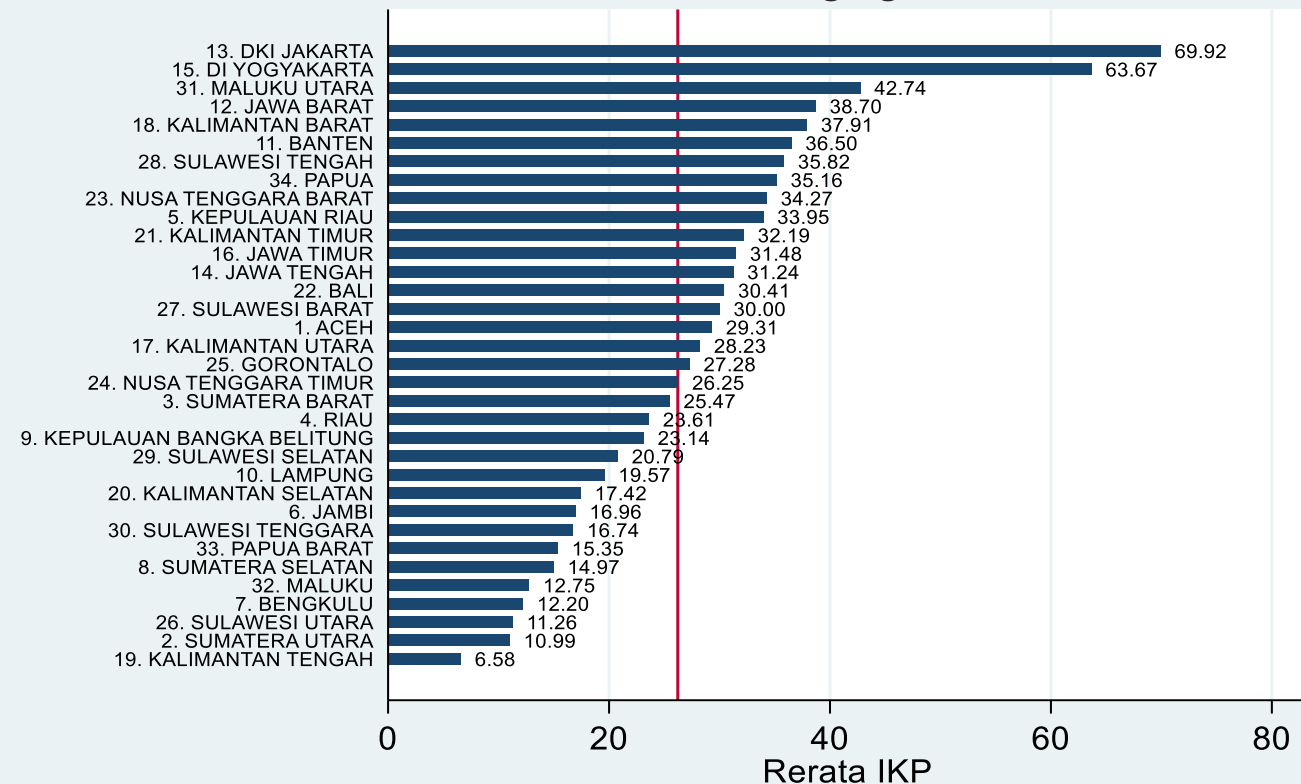


IKP PROVINSI TERTINGGI

DIMENSI KONTESTASI

1. DKI Jakarta
2. DI. Yogyakarta
3. Maluku Utara
4. Jawa Barat
5. Kalimantan Barat
6. Banten
7. Sulawesi Tengah
8. Papua
9. Nusa Tenggara Barat
10. Kepulauan Riau

IKP Dimensi Kontestasi 2024
Berdasarkan Agregasi Kab/Kota

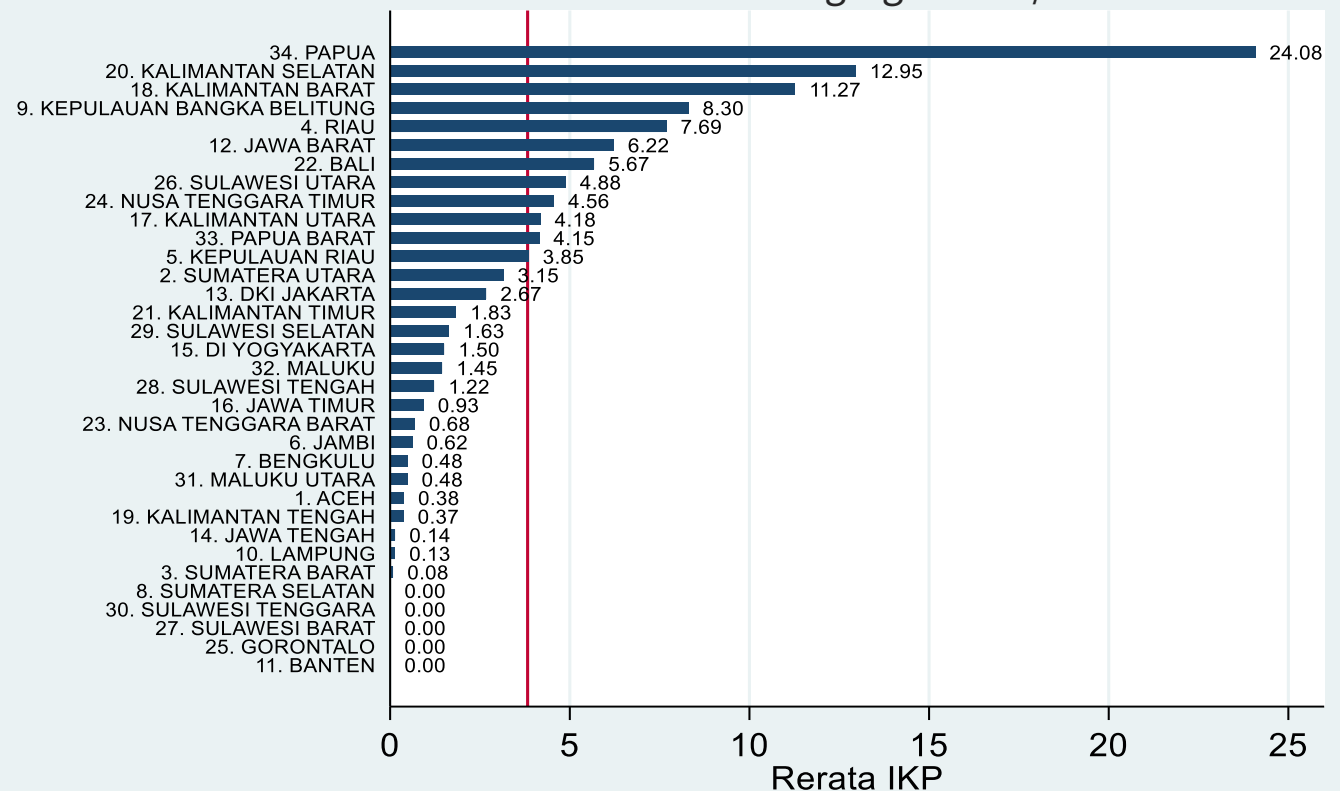


IKP PROVINSI TERTINGGI

DIMENSI PARTISIPASI

1. Papua
2. Kalimantan Selatan
3. Kalimantan Barat
4. Kep. Bangka Belitung
5. Riau
6. Jawa Barat
7. Bali
8. Sulawesi Utara
9. Nusa Tenggara Timur
10. Kalimantan Utara

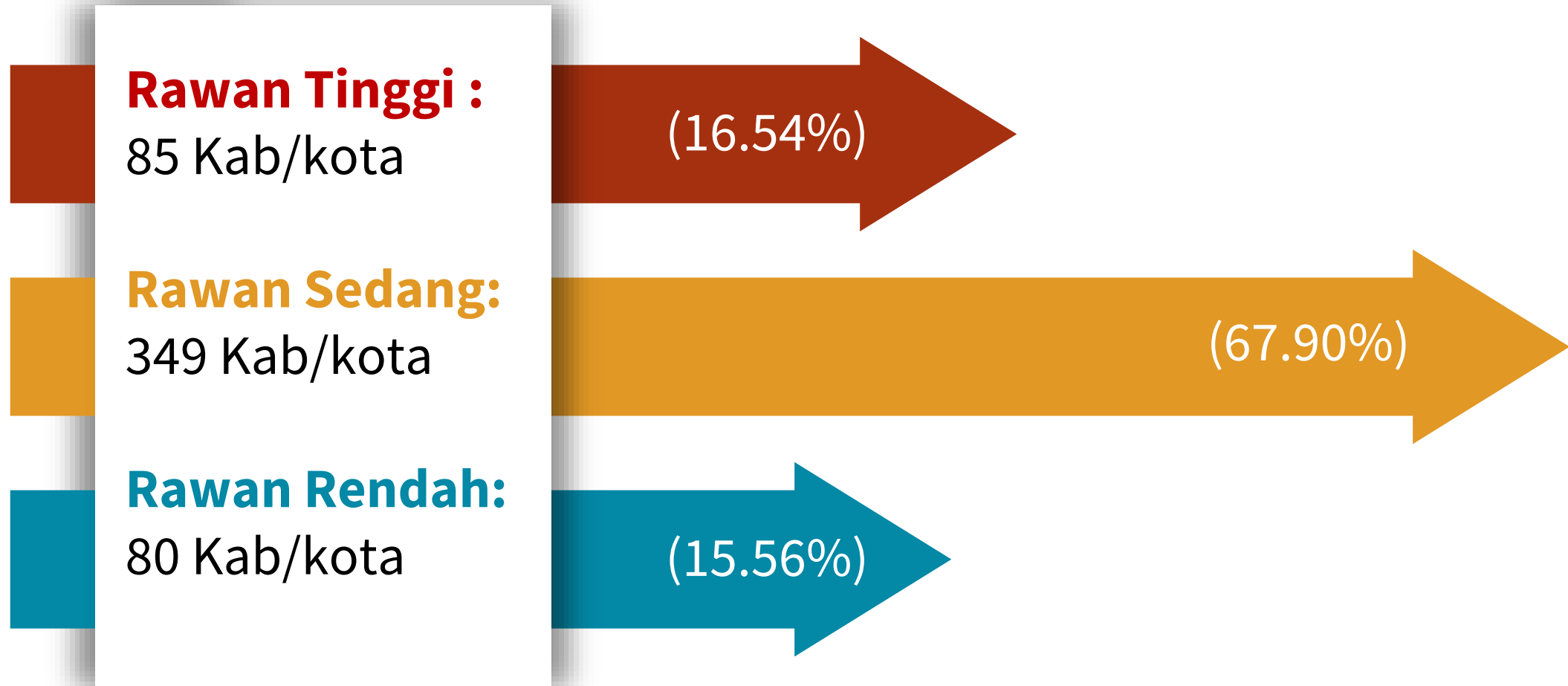
IKP Dimensi Partisipasi 2024
Berdasarkan Agregasi Kab/Kota





INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

TINGKAT IKP KABUPATEN/KOTA



KERAWANAN KAB/KOTA PER DIMENSI IKP



KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

- **Tinggi : 76**
Kab/kota (14.79%)
- **Sedang : 370**
Kab/kota (71.98%)
- **Rendah : 68**
Kab/kota (13.23%)



PENYELENGGARAAN PEMILU

- **Tinggi : 84**
Kab/kota (16.34%)
- **Sedang : 339**
Kab/kota (65.95%)
- **Rendah : 91**
Kab/kota (17.70%)



KONTESTASI

- **Tinggi : 95**
Kab/kota (18.48%)
- **Sedang : 419**
Kab/kota (81.52%)
- **Rendah : 0**
Kab/kota (0%)



PARTISIPASI

- **Tinggi : 30**
Kab/kota (5.84%)
- **Sedang : 484**
Kab/kota (94.16%)
- **Rendah : 0**
Kab/kota (0%)

KABUPATEN/KOTA RAWAN TINGGI

NO	PROVINSI	SKOR IKP	NO	PROVINSI	SKOR IKP	NO	PROVINSI	SKOR IKP	NO	PROVINSI	SKOR IKP	NO	PROVINSI	SKOR IKP
1	KAB. INTAN JAYA	100	18	KAB. PURWOREJO	67.11	35	KAB. LOMBOK TENGAH	61.23	52	KAB. NABIRE	56.28	69	KAB. BANGGAI	52.66
2	KAB. JAYAWIJAYA	100	19	KAB. SIMEULUE	67.07	36	KAB. BATANG HARI	61.18	53	KAB. TUBAN	56.21	70	KAB. PASAMAN BARAT	52.66
3	KAB. BANDUNG	91.59	20	KAB. KOTABARU	65.52	37	KAB. MIMIKA	61.18	54	KAB. BOJONEGORO	55.76	71	KAB. KETAPANG	52.27
4	KAB. YALIMO	86.66	21	KAB. TASIKMALAYA	65.42	38	KAB. FAKFAK	61.04	55	KOTA BEKASI	55.48	72	KAB. SAMPANG	52.19
5	KAB. MAPPI	82.13	22	KOTA JAKARTA TIMUR	65.14	39	KAB. BANDUNG BARAT	59.93	56	KAB. MAMUJU	54.90	73	KAB. ALOR	51.83
6	KOTA BANJARBARU	80.14	23	KAB. KEPULAUAN YAPEN	64.93	40	KAB. MAMBERAMO TENGAH	59.68	57	KOTA PAREPARE	54.69	74	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	51.75
7	KAB. JAYAPURA	78.05	24	KAB. CIREBON	64.79	41	KAB. NIAS SELATAN	59.65	58	KAB. LAMPUNG TENGAH	54.65	75	KAB. KUTAI KARTANEGARA	51.49
8	KAB. PANDEGLANG	77.74	25	KAB. SLEMAN	64.56	42	KAB. NDUGA	59.55	59	KAB. SARMI	54.34	76	KOTA TASIKMALAYA	51.28
9	KAB. LABUHANBATU UTARA	76.29	26	KAB. HALMAHERA TENGAH	64.19	43	KAB. TEMANGGUNG	59.05	60	KAB. MAGELANG	54.25	77	KAB. PACITAN	51.17
10	KAB. MALAKA	76.03	27	KAB. MALANG	64.01	44	KAB. LEBAK	58.78	61	KAB. PASANGKAYU	54.21	78	KAB. KUNINGAN	51.10
11	KOTA TERNATE	75.30	28	KAB. AGAM	63.96	45	KOTA SUNGAI PENUH	58.67	62	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	54.04	79	KAB. KONAWA SELATAN	50.68
12	KOTA SEMARANG	73.26	29	KAB. KEDIRI	63.40	46	KAB. WONOSOBO	58.35	63	KOTA SERANG	53.32	80	KAB. CIANJUR	50.65
13	KAB. TOLIKARA	72.51	30	KAB. PUNCAK	63.23	47	KAB. ACEH SELATAN	57.75	64	KAB. KENDAL	53.25	81	KOTA KOTAMOBAGU	50.65
14	KAB. SUKOHARJO	70.20	31	KAB. BULUKUMBA	63.19	48	KAB. SUMBA TIMUR	57.52	65	KAB. BANYUASIN	53.19	82	KAB. KUTAI BARAT	50.33
15	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	67.72	32	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	63.03	49	KAB. KERINCI	57.42	66	KAB. NAGAN RAYA	53.03	83	KAB. MUNA	49.91
16	KAB. LOMBOK TIMUR	67.57	33	KOTA BANDAR LAMPUNG	62.90	50	KOTA JAYAPURA	56.64	67	KAB. SEKADAU	52.78	84	KAB. ASMAT	49.47
17	KAB. MAJALENGKA	67.14	34	KAB. PIDIE	61.80	51	KAB. SIGI	56.38	68	KAB. WAKATOBI	52.73	85	KAB. JENEPONTO	49.38

PENGARUH KERAWANAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DALAM IKP

PENGARUH KERAWANAN DALAM IKP

PROVINSI

- **Penyelenggaraan Pemilu** adalah dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan pemilu dengan skor 54,27 diikuti oleh **Konteks Sosial Politik** dengan skor 46,55 kemudian **Kontestasi** dengan skor 40,75 dan **Partisipasi Politik** dengan skor 17,23.

KABUPATEN/KOTA

- **Penyelenggaraan Pemilu** juga menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan pemilu dengan skor 42,22 diikuti oleh **Konteks Sosial Politik** dengan skor 31,13 kemudian **Kontestasi** dengan skor 26,22 dan **Partisipasi Politik** dengan skor 3,83.

ISU STRATEGIS 1

1. **Netralitas Penyelenggara Pemilu:** polemik netralitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi pengalaman penting dalam menajada kemandirian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tahapan Pemilu kedepan.
2. **Pelaksanaan Tahapan di provinsi baru.** Perhatian penuh terhadap persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya terutama pembentukan penyelenggara Pemilu.



ISU STRATEGIS 2

- 3. Potensi Polarisasi Masyarakat.** Perhatian penuh untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas dalam setiap tahapan pemilu.
- 4. Mitigasi dampak penggunaan media sosial.** Melakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam dinamika politik kedepan.
- 5. Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih.** Pemenuhan hak politik dan pelayanan penuh terhadap perempuan dan kelompok rentan.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TERIMA KASIH



SISTEM PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2024

TOTOK HARIYONO

DEMOKRASI

Ada banyak varian terkait dengan demokrasi, sebagaimana dijelaskan oleh *founding fathers* kita Bung Karno yang meletakkan sosio sebelum demokrasi dan disebut sebagai sosio demokrasi dimana demokrasi yang berdiri diatas dua kaki di masyarakat dalam politik dan ekonomi. Diperkuat melalui sosio nasionalisme yakni nasionalisme masyarakat, nasionalisme yang mencari selamatnya seluruh masyarakat, jadilah demokrasi Indonesia tumbuh dengan bentuknya sendiri, gayanya sendiri. "Di samping elemen-elemen yang sama, yaitu elemen-elemen universal dalam azas-azas demokrasi pada umumnya, maka demokrasi Indonesia masih harus menemukan elemen-elemen khusus, elemen-elemen spesifik yang mendasar jiwa dan irama kehidupan politik bangsa Indonesia sendiri. Adakah elemen-elemen khusus itu? Ada! Ambillah misalnya elemen khusus Indonesia "gotong-royong" dan elemen musyawarat dalam suasana "kekeluargaan". Elemen-elemen ini tidak ada pada bangsa-bangsa di dunia Barat. Elemen-elemen ini adalah warisan daripada tradisi jiwa Bangsa Indonesia turun-temurun berabad-abad

Secara *original intent* Bung Karno menjelaskan demokrasi adalah alat, alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang sempurna. Pemilihan umum adalah alat untuk menyempurnakan demokrasi itu.

Berdasarkan konstitusi dalam UUD NKRI tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) dimana Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

PEMILU

PENYELENGGARA PEMILU SECARA KONSTITUSIONAL

Untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, "Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Kalimat "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Menurut Mahkamah Konstitusi, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini **Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)** sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil.

Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu.

(vide putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010)



DESAIN PENGAWASAN PEMILU

Idea menjelaskan kontruksi pengawasan secara umum:

"Election observation has two main purposes: to assess the election against agreed or accepted standards, and to provide a presence and visibility which will provide fewer opportunities for irregularities and deter fraud. The first purpose can be achieved with a limited number of observers, since conclusions may be drawn from samples. The second objective is likely to require a much larger presence".

Ada 2 tujuan utama dari pengawas pemilu :

Pertama, untuk menilai pelaksanaan pemilu berdasarkan standar yang telah disepakati atau diterima.

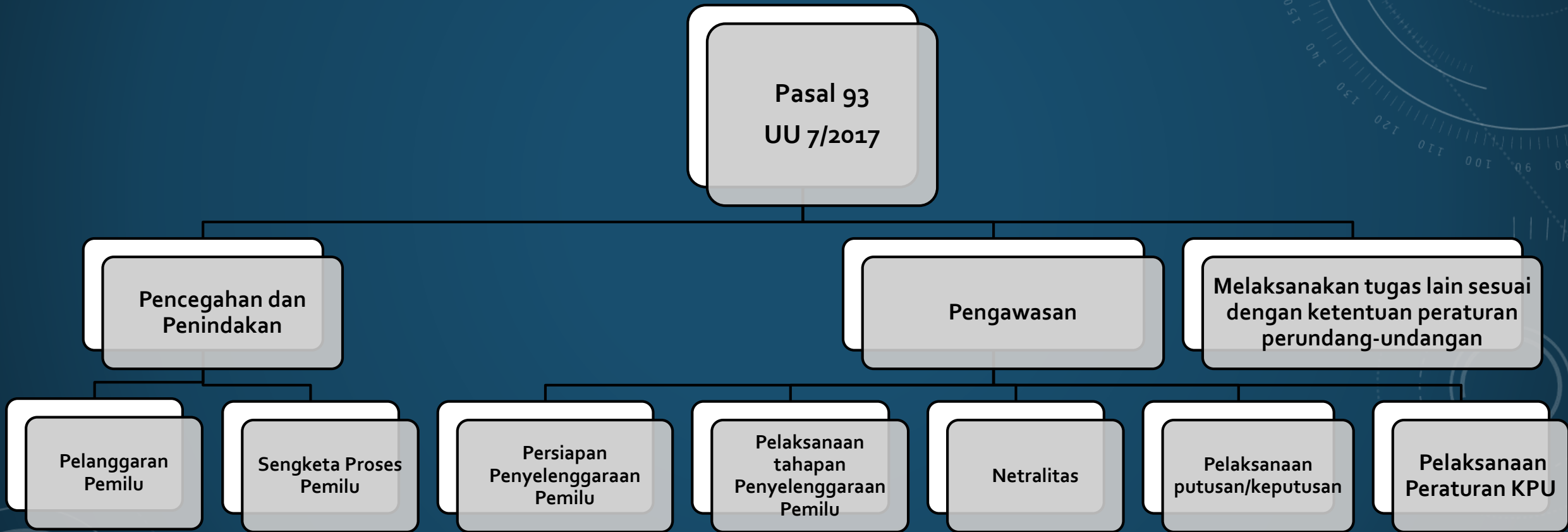
Kedua, untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dan mencegah kecurangan.

Terhadap tujuan pertama dapat melibatkan pengawas yang sedikit dengan menggunakan sampel, namun untuk tujuan kedua membutuhkan pengawas yang banyak serta kuat.

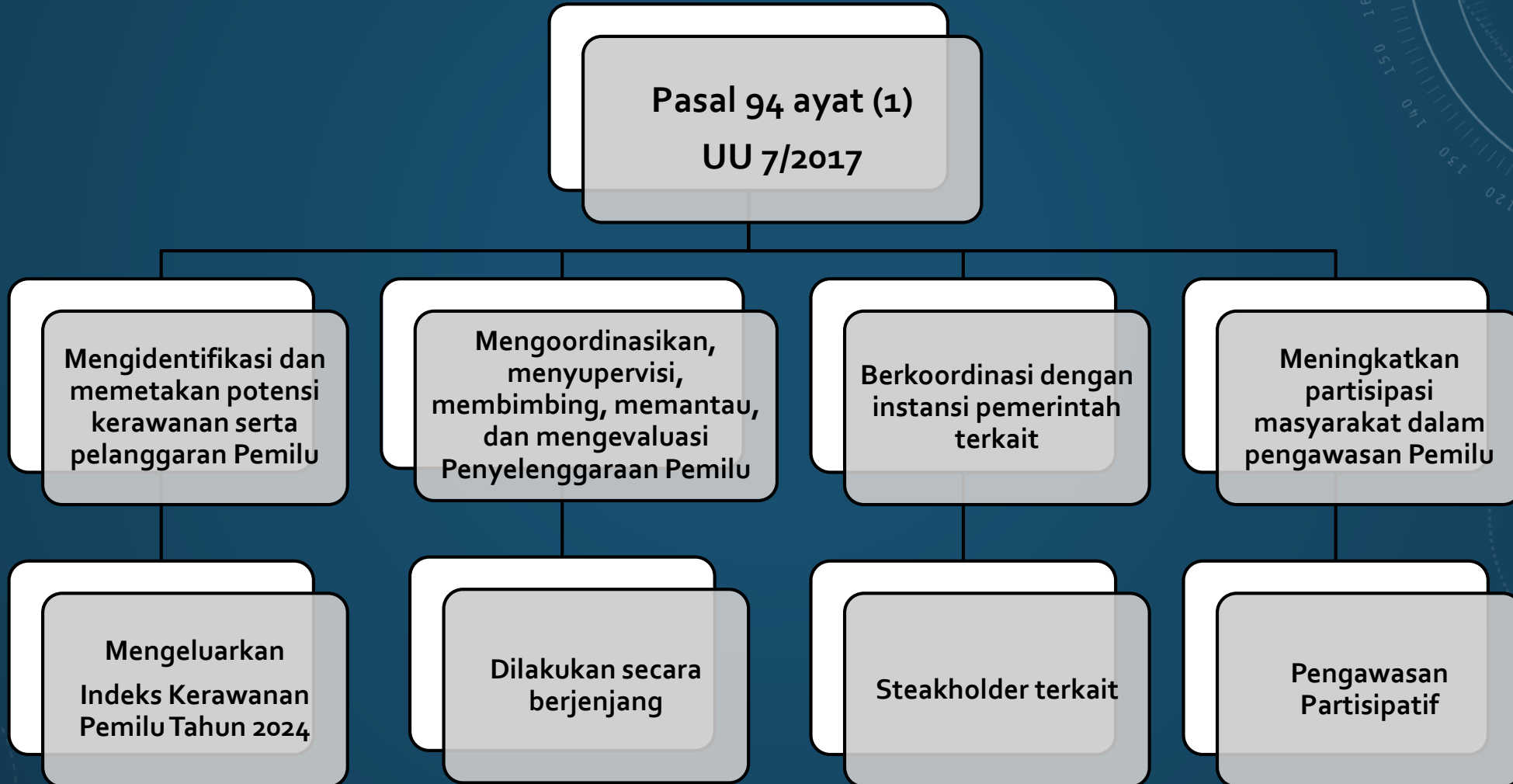
Desain pengawas pemilu Indonesia saat ini ingin mencapai 2 tujuan utama tersebut, artinya Pengawas Pemilu di Indonesia harus didesain dalam jumlah banyak dan juga kuat sehingga dapat mencapai tujuan tersebut.



KONSTRUKSI TUGAS BAWASLU



POLA PENCEGAHAN



POLA PENINDAKAN



**Pasal 94 ayat (2) dan
ayat (3)
UU 7/2017**

Penindakan pelanggaran

- a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
- d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

(Jo Perbawaslu 7/2022, Perbawaslu 8/2022, Perbawaslu 31/2018)

Sengketa Proses Pemilu

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

(Jo Perbawaslu 9/2022)

POLA PENGAWASAN

Pasal 93 UU 7/2017 (Jo Perbawaslu 5/2022)

Persiapan Penyelenggaraan Pemilu

1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu

1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
3. penetapan Peserta Pemilu;
4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. penetapan hasil Pemilu;

Netralitas
ASN, TNI,
Polri

Putusan / Keputusan

1. putusan DKPP;
2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Pelaksanaan
Peraturan KPU

GOTONG ROYONG DALAM PENCEGAHAN, PENINDAKAN SERTA PENGAWASAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILU TAHUN 2024

Merubah Paradigma bukan seberapa banyak Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa yang dilakukan melainkan seberapa maksimal pencegahan yang dilakukan

Menyusun instrumen pengawasan serta Pemetaan Kerawatanan pada Setiap Tahapan Pemilu

Mengefektifkan Sosialiasi dan Koordinasi kepada sesama penyelenggara Pemilu, seluruh partai politik dan peserta pemilu serta memaksimalkan pengawasan partisipatif

Melakukan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan semua Tahapan Pemilu

KAITANNYA DENGAN PHPU



- **Hasil Pencegahan berupa:**

Surat Edaran, Surat Himbauan dan Surat lain merupakan bagian penting Bawaslu sebagai pemberi keterangan sudah melakukan Langkah-Langkah preventif.

- **Hasil Penindakan berupa:**

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Putusan Sepakat Mediasi atau Putusan Adjudikasi terhadap objek penyelesaian sengketa berupa Surat Keputusan dan/atau Berita Acara KPU.

Penanganan Pelanggaran : Temuan atau Laporan, Putusan terhadap pelanggaran administrasi, Pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu dan/ atau hasil kajian berupa penerusan terkait pelanggaran undang-undangan lainnya.

Hasil penindakan menjadi bagian penting, bahwa Bawaslu sebagai pemberi keterangan melakukan upaya penegakan hukum dalam tahapan-tahapan sudah diselesaikan oleh Bawaslu yang sangat mungkin menjadi bagian dari dalil-dalil dalam PHPU.

Hasil Pengawasan berupa:

Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A .

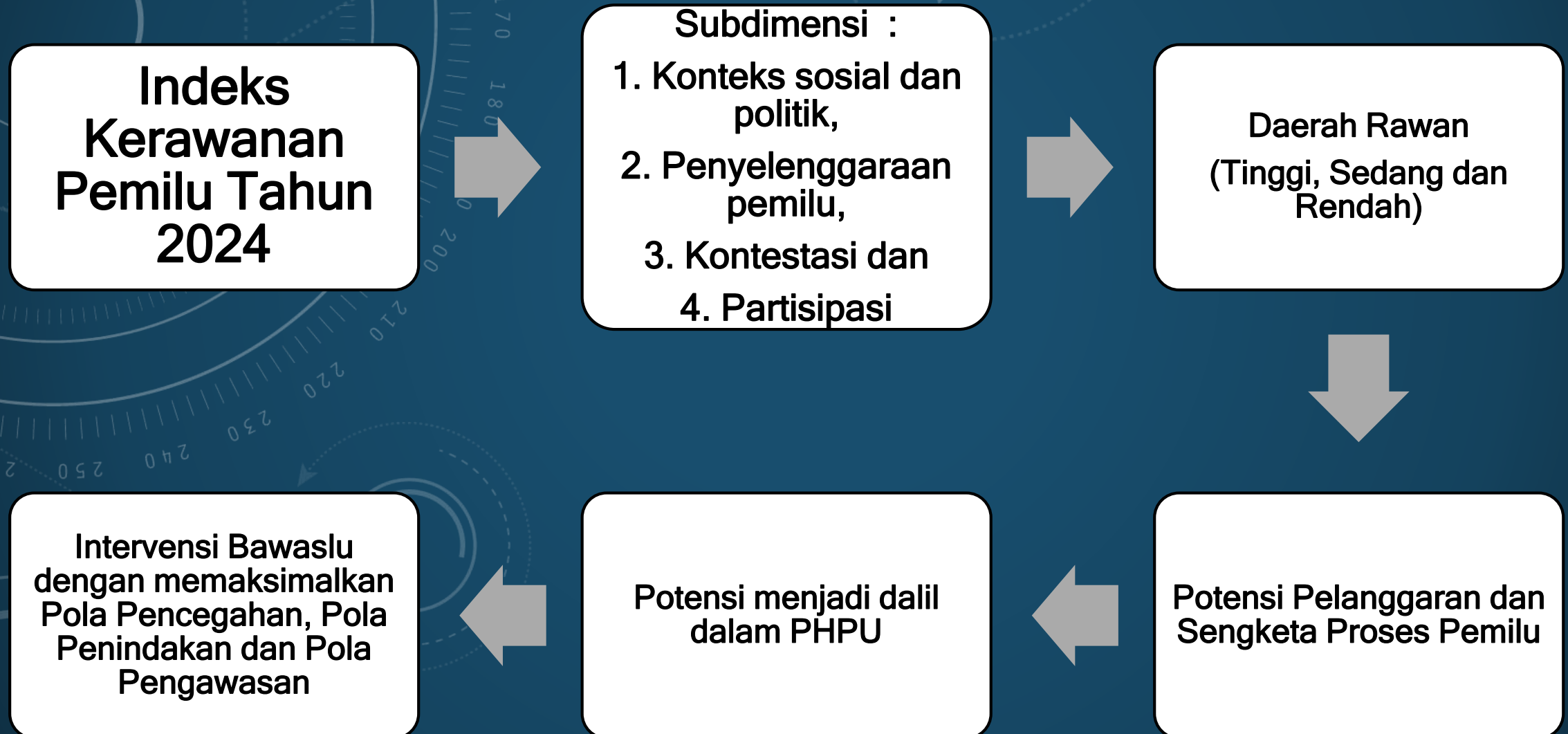
Dalam hal hasil Pengawasan terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan:

- a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau
- b. Pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.

Formulir model A merupakan bagian sangat penting kaitannya Bawaslu sebagai pemberi keterangan, hal ini dikarenakan dalam Formulir model A tersebut segala peristiwa mulai dari Data Pengawas, Kegiatan Pengawasan, Uraian hasil pengawasan, informasi dugaan pelanggaran dan informasi potensi sengketa proses pemilu dicatat dan dilaporkan secara berjenjang.

Akibat logisnya Formulir model A hasil pengawasan menjadi penerang peristiwa dalam semua kejadian setiap tahapan pemilu, hal ini memudahkan baik itu Majelis Mahkamah Konstitusi, Pemohon, Termohon dan Pihak lainnya dalam PHPU.

Indeks Kerawanan Pemilu dan Kaitannya dengan PHPU



TANTANGAN PEMILU TAHUN 2024

**Beban Kerja Pengawas Pemilu
dengan jumlah SDM yang
kurang**

(Efektifkan model pengawasan dan
memaksimalkan pengawas partisipatif)

**Pemilihan presiden, DPR, DPD,
DPRD, dan juga Pilkada serentak
pada tahun 2024**

(peningkatan kapasitas pengawas dan penguatan
regulasi)

**Politik uang, Politisasi SARA,
Netralitas (ASN, TNI dan Polri)**

(memaksimalkan pola pencegahan dan
mengefektifkan pola penindakan)

Akurasi DPT

(penguatan koordinasi dengan KPU dan
Kemendagri)

**Akses Data, Akses Jaringan
Teknologi Informasi, dan
Kendala Geografis**

(memperkuat system informasi dalam
pengawasan dan postur anggaran sesuai
kebutuhan)

TERIMA KASIH




KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024

*Disampaikan dalam Kegiatan Training of Convention Narasumber &
Fasilitator Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi*

Andi Krisna
(Kepala Biro AHPS)

 www.kpu.go.id

 [kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)

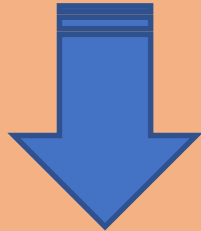
 [KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)

 [@KPU_ID](https://twitter.com/KPU_ID)

 [KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.RI)

Bogor, 26 Januari 2023

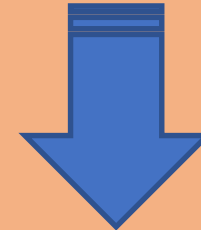
**Pemilu Serentak
Tahun 2019**



*Putusan MK
No. 14/PUU-
XI/2013*



**Dasar Hukum
Penyelenggaraan
Pemilu 2019**



*UU No. 7 Tahun
2017 tentang
Pemilu*

*Tujuan
Pemilu
Serentak*

Pertama

*Menegaskan & mendorong
efektivitas pemerintahan
Presidensial*

Kedua

*Menciptakan efisiensi
penyelenggaraan Pemilu &
menekan besaran anggaran
penyelenggaraan Pemilu*

Pemilu 2019

*Pemilu Anggota
DPR, DPD &
DPRD*

+

*Pemilu Presiden &
Wakil Presiden*

*Pemilu
Serentak*

Pemilu 2024

*Pemilu Anggota DPR,
DPD & DPRD serta
Pemilu Presiden &
Wakil Presiden*

+

*Pemilihan Kepala
Daerah (pada tahun
yang sama)*

Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

**UU No. 7 Tahun
2017 tentang
Pemilu**

Pasal 2 (Asas-Asas Pemilu)

- *Langsung*
- *Umum*
- *Bebas*
- *Rahasia*
- *Jujur*
- *Adil*

Pasal 3 (Prinsip Penyelenggaraan Pemilu)

- *Mandiri*
- *Jujur*
- *Adil*
- *Berkepastian
Hukum*
- *Tertib*
- *Terbuka*
- *Proporsional*
- *Profesional*
- *Akuntabel*
- *Efektif*
- *Efisien*



*Penyelenggara Pemilu
Pasal 1 angka 7
UU No. 7 Tahun 2017*



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tahapan Pemilu 📌 Pasal 167 UU No. 7 Tahun 2017

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Evaluasi Pemilu Tahun 2019

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019

1  Partai Kebangkitan Bangsa	2  Partai Gerakan Indonesia Raya	3  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4  Partai Golongan Karya	5  Partai NasDem
6  Partai Gerakan Perubahan Indonesia	7  Partai Berkarya	8  Partai Keadilan Sejahtera	9  Partai Persatuan Indonesia	10  Partai Persatuan Pembangunan
11  Partai Solidaritas Indonesia	12  Partai Amanat Nasional	13  Partai Hati Nurani Rakyat	14  Partai Demokrat	15  Partai Aceh
16  Partai SIRA	17  Partai Daerah Aceh	18  Partai Nanggroe Aceh	19  Partai Bulan Bintang	20  Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia



Partai Peserta Pemilu 2019



DAFTAR PASANGAN CALON PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

01



CALON PRESIDEN
Ir. H. JOKO WIDODO

CALON WAKIL PRESIDEN
Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



02



CALON PRESIDEN
H. PRABOWO SUBIANTO

CALON WAKIL PRESIDEN
H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



*Pemutakhiran
Data Pemilih*

**Isu
Fundamental**

01

Rezim
“Kewarganegaraan”
atau
“Kependudukan”

02

Stelsel aktif
atau
pasif

03

Standar syarat
sebagai Pemilih

*Pemutakhiran
Data Pemilih*

**Problem Regulasi
(8 Parameter Hukum ala
Lon Fuller)**

- Kontradiksi antar UU (UU Pemilu vs UU Adminduk), Kontradiksi antar PKPU, kontradiksi PKPU dengan UU, Kontradiksi PKPU dengan Bawaslu
- Bentuk Produk Hukum belum mengikat semua pihak, belum tepat, dan belum ada pedoman pembuatan produk hukum KPU
- Norma hukum tidak ajeg, sering berubah baik di Undang-Undang, PKPU, maupun Surat Edaran
- Norma aturan tidak jelas dan tidak komprehensif (missal mekanisme penyusunan data kependudukan & DP4 oleh Pemerintah belum ada, mekanisme tarli di wilayah perbatasan, pemilih nomaden, dll)
- Norma hukum (UU dan PKPU) belum proyektif (norma tentang pemutakhiran data pemilih bagi pemilih rentan administrasi kependudukan).
- Terdapat norma hukum yang meng-eksklusi (tidak berlaku umum), antara lain terkait WNI yang "tidak diakui secara administrasi" oleh pemerintah karena tinggal di lahan sengketa/tanah negara, dst.
- Pengaturan terkait perlindungan data pribadi dimana penetapan informasi data pemilih sebagai informasi dikecualikan menimbulkan konflik dengan Pengawas Pemilu.
- Norma peraturan yang tidak implementatif dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan (Penerapan KTP-el sebagai syarat memilih).

*Pemutakhiran
Data Pemilih*

Evaluasi Sistem
Informasi

Perlu ada regulasi di level UU sebagai payung hukum untuk penggunaan sistem informasi agar aplikasi yang dikembangkan KPU tidak rawan digugat.

Perlu ada sinkronisasi/pemetaan terhadap UU yang menangani data dan sistem informasi (UU ITE, UU PDP, Perpres).

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih & Partisipasi Masy

1. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi yang kemudian bertujuan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat tersebut dilakukan di bilik suara, maupun pada setiap tahapan pemilihan.
3. Meyakinkan masyarakat bahwa mereka berdaya, bukan hanya menjadi obyek dalam pemilihan, tetapi menjadi subyek.
4. Pendidikan pemilih perlu disertai dengan pendidikan civic sebelum dan setelah pemilihan.
5. Mendorong keterbukaan informasi

Tujuan

1. Tingkat partisipasi pemilih tidak serta merta menjadi keberhasilan penyelenggara. Ada tantangan partisipasi dalam hal lain, misalnya terlibat badan adhoc, atau mengawal proses pemilu atau pemilihan.
2. Ada pengaruh dari eksternal yang bisa mengintervensi pilihan masyarakat (vote buying, hoax)
3. Penetrasi internet akan makin pesat, sehingga juga berpotensi membuat penyelenggaraan pemilu berhadapan dengan disinformasi dan post-truth
4. Desain sosialisasi dan pendidikan pemilih yang disiapkan KPU terkadang belum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah
5. Dampak dari pandemi Covid-19 patut dipertimbangkan masih berdampak pada sebagian tahapan sosialisasi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

Tantangan

Kampanye

Tujuan

Membuka ruang diskusi dua arah terkait visi dan misi program kandidat dalam sebuah pemilihan



1. Kampanye pada Pemilihan Serentak 2020 berlangsung di tengah pandemic Covid-19. Perlu dipertimbangkan kemungkinan dampak pandemi atau post-pandemi terhadap kampanye di Pemilu dan Pemilihan 2024.
2. Berkaca pada Pemilihan 2020, transformasi kampanye digital masih belum dipilih pasangan calon. Kandidat masih mengutamakan kampanye fisik.
3. Jaringan internet di sejumlah daerah menjadi kendala. Juga persoalan kuota internet bagi penduduk dengan ekonomi menengah ke bawah.
4. Alat peraga kampanye konvensional difasilitasi penyelenggara, tetapi terkadang tidak digunakan oleh kandidat. Padahal, sudah mengeluarkan biaya besar.
5. Persoalan durasi kampanye yang cukup panjang, berbiaya besar dan bisa menyebabkan adanya polarisasi di masyarakat

Tantangan

Badan Ad Hoc & Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik

1. Memastikan terpilihnya badan adhoc yang berintegritas dan profesional.
2. Memastikan badan adhoc dalam kondisi kesehatan prima sebelum dan setelah berlangsungnya pemilihan.
3. Pengawasan internal oleh KPU Kabupaten/kota mampu meminimalisasi potensi persoalan pelanggaran kode etik

Tujuan

1. Pada Pemilu 2019, banyak jatuh korban penyelenggara adhoc karena beban kerja tinggi. Patut jadi pelajaran pada saat Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Terlebih ada irisan di antara dua pemilihan itu.
2. Tidak mudah mendapat “pasokan” calon anggota badan Adhoc. Pertama, karena administrasi untuk seleksi Badan Adhoc yang rumit dan persyaratan juga tidak mudah. Misalnya, syarat usia dan kemudian periodisasi maksimal 2 kali.
3. Honorarium untuk KPPS relatif rendah, tidak sebanding dengan beban kerja. Ada disparitas honorarium antara KPPS di pemilu dan pemilihan. Perlu diantisipasi di Pemilu dan Pemilihan 2024.
4. Belum ada aplikasi untuk basis data, proses rekrutmen, monitoring kinerja, maupun memantau pelanggaran kode etik yang dilakukan badan adhoc. SIPP tidak mampu memenuhi kebutuhannya itu.
5. Belum adanya juknis yang mengatur tentang penanganan kode etik badan adhoc, termasuk kebutuhan persidangan cepat kode etik badan adhoc.
6. Tidak adanya penganggaran untuk penanganan kode etik badan adhoc

Tantangan



DANA KAMPANYE



Peraturan KPU harus mengatur dan mendesain aturan dana kampanye sesuai dengan standar akuntansi penggunaan dana kampanye dan wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi keuangan

1

Menyelaraskan Ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan, dalam isu Dana Kampanye, bahwa penggunaan dana kampanye wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016.

2

3

Tata Kelola:

- a. Mengatur Ulang Tata Kelola Pelaporan Dana Kampanye dalam Peraturan KPU
- b. Mengatur ulang terkait dengan pelaporan rekening awal dan saldo akhir Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
- c. Sistem Informasi yang terintegrasi

TUNGSURA, REKAPITULASI, PENETAPAN HASIL



Regulasi

1

PKPU tentang Pungut Hitung, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil yang mengurangi beban dan mempermudah kerja Badan Adhoc serta meningkatkan akurasi hasil Pemilu melalui penyederhanaan formulir, pengoptimalan pemanfaatan IT untuk mencegah penyalahgunaan hak pilih, penyerahan Salinan model C-Hasil melalui Salinan digital dan/atau melalui PPS yang dilegalisir

2

Perlunya legalitas penggunaan IT untuk pungut hitung suara, rekapitulasi dan penetapan hasil melalui Undang Undang Pemilu dan Pemilihan

3

Perlu percepatan penyusunan dan pengesahan PKPU sehingga tidak menghambat pelaksanaan tahapan dengan memperhitungkan keharusan konsultasi PKPU ke DPR dan Pemerintah, serta harmonisasi PKPU di Kemenkumham yang membutuhkan waktu lama

4

Penyelarasan dan penegasan aturan terkait dengan persyaratan dilaksanakannya PSU, PSS, PSL dan pihak yang berwenang untuk menentukan PSU, PSS, dan PSL pada Pemilu dan Pemilihan

5

Sinkronisasi atas perbedaan pengaturan antara PKPU Tahapan dan PKPU Tungsura terkait waktu penetapan hasil Pemilu atau penetapan pasangan calon terpilih

6

Pengaturan ulang terkait jumlah KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih di TPS serta jumlah PPS dan PPK yang mengacu pada indikator jumlah TPS

7

Regulasi yang mengatur wilayah wilayah yang menjadi kantong Pemilih terkait dengan ketersediaan logistik surat suara (ex: Kota Pelajar)

8

Ketentuan tentang pembagian jadwal kedatangan Pemilih pada TPS perlu dipertahankan pada Pemilu dan Pemilihan mendatang

9

Sinkronisasi PKPU Pemilu dan Pemilihan terkait TPS Permanen dengan jumlah Pemilih yang sama pada Pemilu dan Pemilihan

TUNGSURA, REKAPITULASI, PENETAPAN HASIL



Tata Kelola

- 1 Orientasi Bimtek lebih kepada Simulasi, waktu lebih Panjang dan memiliki standar materi Bimtek yang sudah diterapkan
- 2 Materi Bimtek menggunakan teknologi dan konten-konten kreatif
- 3 Memperkuat infrastruktur IT dan optimalisasi kualitas untuk rekapitulasi suara (Sirekap) dan Situng
- 4 Membangun mekanisme yang terlembaga yang mampu meminimalisir risiko pemilih ganda

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

Regulasi

1. Perlu ada aturan di UU yang membuka ruang bagi KPU untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan Bawaslu tentang sengketa proses dan pelanggaran administrasi serta putusan TUN
2. Perlu ada aturan di Undang-Undang terkait batasan yuridiksi Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi, (misal Batasan kewenangan Bawaslu terhadap kasus sama yang sedang berlangsung di MK).

Tata Kelola

1. Diperlukan Produk Hukum (PKPU atau Juknis) menghadapi sengketa hasil Pemilu beserta draft dokumen yang diperlukan secara lengkap sehingga KPU kab/kota memiliki panduan untuk menyiapkan dokumen tersebut
2. Dalam menyusun Peraturan KPU dan Bawaslu perlu dibahas lebih awal dengan sesama penyelenggara Pemilu untuk menyamakan persepsi terhadap isu-isu krusial sebelum uji publik atau Rapat Dengar Pendapat di DPR, supaya ada kesepahaman dan tafsir yang sama atas suatu produk hukum
3. Perlu adanya pertemuan tripartit secara berkala untuk membangun konsolidasi antara KPU, Bawaslu dan DKPP



PERSELISIHAN HASIL PEMILU DAN PEMILIHAN

- 1 Perlu ada Peraturan KPU yang mengatur tentang standar penyusunan kode alat bukti sesuai dengan aturan MK
- 2 Aturan mengenai penambahan durasi untuk menyiapkan jawaban tertulis dan penyiapan alat bukti
- 3 Perlu adanya aturan dalam Peraturan KPU untuk menyederhanakan alat bukti C-Hasil-KWK yang terlalu besar untuk di salin menjadi alat bukti ke MK



Sistem Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

Pasal 168 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu



- 1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
- 2 Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
- 3 Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Tantangan Pemilu Tahun 2024

Pemilu Tahun 2024

- 1 **Pemilu 2019 & 2024 memiliki kesamaan.**
- 2 **Pemilu & Pemilihan mendatang jadi kompleks, karena diselenggarakan di tahun yang sama (2024).**
- 3 **Modal yang membuat kita optimis pengalaman menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan melaksanakan Pilkada 2020 dalam situasi Pandemi Covid-19.**



Jadwal Pemungutan Suara Pemilu & Pemilihan Tahun 2024



**Pemilu Anggota DPR,
DPD & DPRD serta
Pemilu Presiden &
Wapres
14 Februari 2024**

**Pemilihan Kepala
Daerah & Wakil
Kepala Daerah
27 November 2024**



Peserta Pemilu & Pemilihan Tahun 2024



PARTAI POLITIK



CAPRES - CAWAPRES



PERSEORANGAN DPD



CAGUB - CAWAGUB



CABUP - CAWABUP

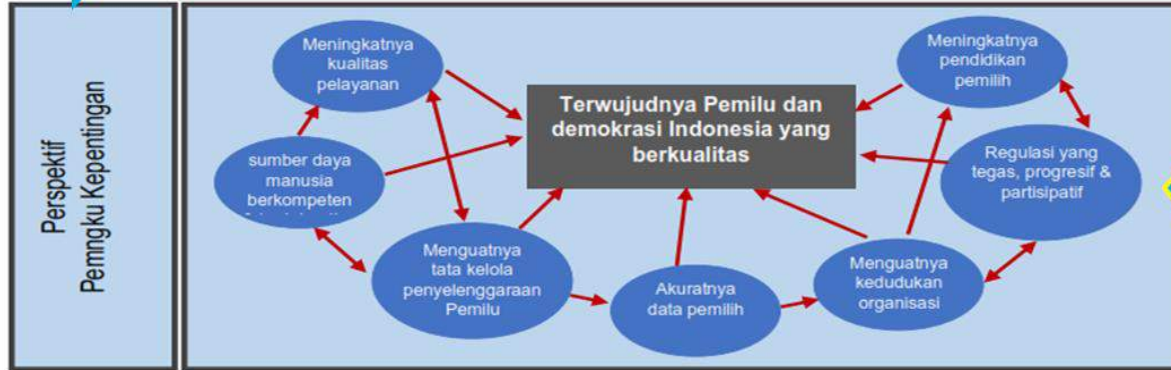


CAWALKOT - CAWAWALKOT

Komitmen & Arah Kebijakan KPU dlm Mewujudkan Integritas Pemilu



Visi KPU:
"Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Profesional, Berintegritas dan Mandiri untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL"



Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok Lembaga

Perumusan Kebijakan	Pelayanan dan Diseminasi	Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi
Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pemilu	Menetapkan standar pelayanan publik	Mengoptimalkann pengawasan melekat pada setiap level manajemen
Menetapkan agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan	Pemanfaatan teknologi informasi dan pemutakhiran data pemilih	Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja organisasi
Mendorong pengembangan inovasi kebijakan	Memperkuat fungsi humas dan media center	
	Memperkuat fungsi hukum organisasi	
	Mendesiminasiakan kebijakan penyelenggaraan Pemilu	
	Mendorong dan meningkatkan pendidikan pemilih	



Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Kelembagaan	sumber daya	Kepemimpinan	Rencana & Dana	Infrastruktur & IT
Membangun organisasi yang profesional, efektif dan efisien	Mengembangkan sumber daya manusia yang berkompeten, berintegritas dan	Mengembangkan sinergitas antara Pimpinan KPU dan Setjen	Mengembangkan manajemen kinerja yang terintegrasi	Membangun infrastruktur dan IT yang tepat fungsi

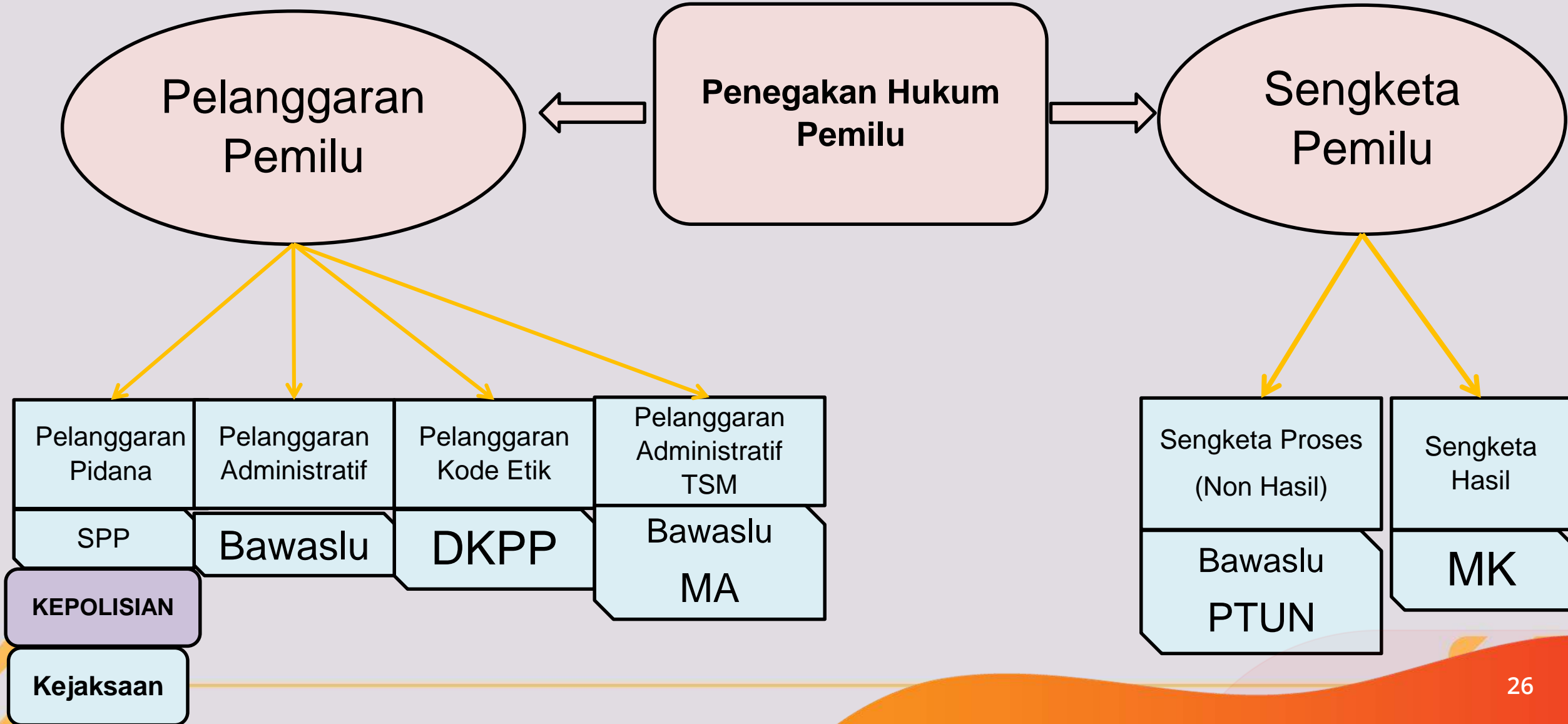


Tahapan Pemilu Tahun 2024

No.	Tahapan	Jadwal
1.	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	
	a. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu	14 Juni 2022 s/d 14 Juni 2024
	b. Penyusunan PKPU	14 Juni 2022 s/d 14 Des 2023
2.	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih	14 Okt 2022 s/d 21 Jun 2023
3.	Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	29 Jul 2022 s/d 13 Des 2022
4.	Penetapan Peserta Pemilu	14 Des 2022
5.	Penetapan jumlah kursi & penetapan Dapil	14 Okt 2022 s/d 9 Feb 2023
6.	Pencalonan	
	a. Anggota DPD	6 Des 2022 s/d 25 Nov 2023
	b. Anggota DPR & DPRD	24 Apr 2023 s/d 25 Nov 2023
	c. Presiden & Wakil Presiden	19 Okt 2023 s/d 25 Nov 2023
7.	Masa Kampanye Pemilu	28 Nov 2023 s/d 10 Feb 2024
8.	Masa Tenang	11 Feb 2024 s/d 13 Feb 2024
9.	Pemungutan & penghitungan suara	
	a. Pemungutan suara	14 Feb 2024
	b. Penghitungan suara	14 Feb 2024 s/d 15 Feb 2024
	c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara	15 Feb 2024 s/d 20 Mar 2024
10.	Penetapan hasil Pemilu (d disesuaikan dengan terdapat atau tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu)	

Pelanggaran Pemilu

Penegakan Hukum Pemilu (Electoral Law Enforcement)



*Jumlah
Perkara yg
dihadapi
KPU per
Januari 2024*



*Laporan Pelanggaran Adm. Pemilu di Bawaslu RI
Pada Masa Pendaftaran & Verifikasi
(17 Laporan)*

- 1. Partai Berkarya
(2 Laporan)*
- 2. Partai Pelita (2
Laporan)*
- 3. Partai IBU*
- 4. PAKAR*
- 5. PKR*
- 6. PBI*
- 7. Partai Kongres*
- 8. Partai Pandu
Bangsa*

- 9. Partai Pemersatu
Bangsa*
- 10. PANDAI*
- 11. PERKASA*
- 12. Partai Masyumi*
- 13. Partai Kedaulatan*
- 14. Partai Reformasi*
- 15. Partai Republik
Satu*

*Jumlah
Perkara yg
dihadapi
KPU per
Januari 2024*

*Permohonan Sengketa Proses Pemilu (SPPU)
di Bawaslu RI
Pada Masa Pendaftaran & Verifikasi
(6 Laporan)*

- 1. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)*
- 2. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)*
- 3. Partai Republik*

- 4. Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo)*
- 5. Partai Republiku Indonesia*
- 6. Partai Ummat*



*Jumlah
Perkara yg
dihadapi
KPU per
Januari 2024*



*Gugatan di PTUN Jakarta
(25 Gugatan)*

1. *Partai IBU (2 Gugatan)*
2. *Partai Masyumi (3 Gugatan)*
3. *PKR (2 Gugatan)*
4. *PANDAI (2 Gugatan)*
5. *Partai Republik*

6. *Parsindo (3 Gugatan)*
7. *Partai Republiku Ind. (2 Gugatan)*
8. *Prima (2 Gugatan)*
9. *DPN PKP*
10. *Partai Republik*
11. *DPP Partai Berkarya*
12. *PERKASA*

Tantangan Pemilu Serentak 2024



- ✓ Penataan & Pembagian Dapil untuk Pemilu Anggota DPR & DPRD Provinsi pasca Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022
- ✓ Metode pencalonan, pemberian suara, & penetapan pemenang ⇒ Penerapan Aplikasi Silon & Sirekap
- ✓ Penataan organisasi ⇒ pola rekrutmen Anggota KPUD agar menghasilkan SDM yg mumpuni & berintegritas;

- ✓ Logistik & distribusi ⇒ melakukan pengadaan dengan transparan sesuai kebutuhan logistik & distribusi tepat jumlah dan waktu;
- ✓ Pemantau ⇒ Pola rekrutment Pemantau yg berintegritas
- ✓ Pemilu di tengah Pandemi;
- ✓ Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yg tepat sasaran sesuai demografi Pemilih dan kategori Pemilih Pemula, Generasi Milenial, & Gen Z;

- ✓ Pelaporan dan Audit Dana Kampanye secara transparan dan akuntabel
- ✓ Penerapan Teknologi Informasi;
- ✓ Pencegahan tindak pidana korupsi.



Terima Kasih

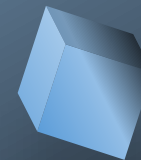
SEMOGA SEHAT SELALU!



PUBLIC SPEAKING

Presentation Skill & Managing Class

By Mohamad Soleh, S.Psi, MM, CNLP & CRGP





Opening:

- Opening & Perkenalan
- Tujuan Pelatihan
- Learning Mindset
- Preview Program



Sesi - 1

Mohamad Soleh, S.Psi, MM, CNLP, CRGP

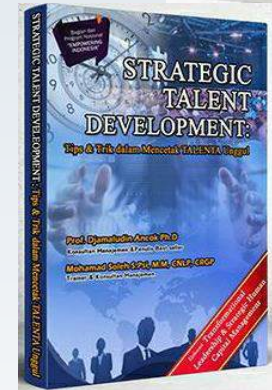
Master Speaker, Consultant & Assessor



- Managing Director AIDA Consultant
- Senior Consultant : SmartRisk Consultant
- Associate Senior Consultant for Sucofindo, PPA, Nayla
- Consultant for Strategy Management, CbHRM, Reformasi Birokrasi, Project & Risk Management
- Speaker for Self improvement, Teambuilding, Leadership, HR Management
- Project Manager & Coordinator Assessor of Assessment Center
- UNDP Consultant : 2006 – 2008
- Local Consultant : 2005 – 2006
- Prosys Group, Project & Risk Management Consultant company: 2005 – 2006
- Heinz ABC & Local Companies, HR Dept.

Additional Information

- ★ As the 2nd rank on Best Student Competition of Kopertis V/ Provinsi DI Yogyakarta
- ★ As the 1st rank on Best Student Competition of Islamic University of Indonesia
- ★ As the 2nd rank on DI Yogyakarta & National Scientific Writing Competition
- NLP International Certification
- Speaker certified BNSP
- Presenter for National & International Conference
- Speaker on INSPIRATOR program (13 live on TV Cable Program)
- Member of Global Integrated Risk Management Association (GIRMA)
- Client : Ministries & Institutions (Kemenkop UMKM, Kemenag, Kemenkumham, Kemendagri, BSSN, KememBUMN, Kemen ESDM, LPP KUKM, BEI, BI, BPK, BPN, BPKP, BPKS), KPUD, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Babel, Pemprov Aceh, Pemkot Tangerang, Pemkot Serang, BUMN (Timah, Pelindo 1, Biofarma, Taspen Group, Wika, Brantas Abipraya, Asabri, Nindya Karya, AirNav, PLN Group, Pertamina Group, POS, Semen Indonesia Group), International NGO (UNDP, MSF Holland, AusAid, KNCV) and hundreds of other private companies

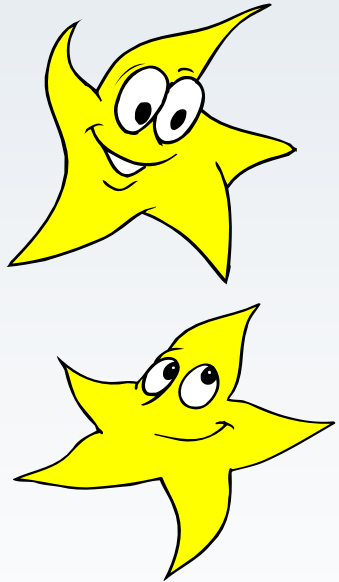


WELCOME

EXPLORE AND ACTIONABLE INSIGHT TRAINING



Salam Training



1. Selamat Pagi
2. Selamat Siang
3. Selamat Sore

→ Semangat
→ Kerja Keras
→ GAJIAAN

Mengapa Kita Belajar Di sini?

- 1 • Memahami pengetahuan dan ketrampilan dasar Public Speaking yang efektif
- 2 • Mampu menerapkan Ketrampilan dasar dan tips & Trik dalam berperan sebagai Public Speaker
- 3 • Terlaksananya Praktek Perkenalan (Latihan & evaluasi) & tersusunnya Individual Development Plan as Public Speaker



Preview Program: Speaker Sukses



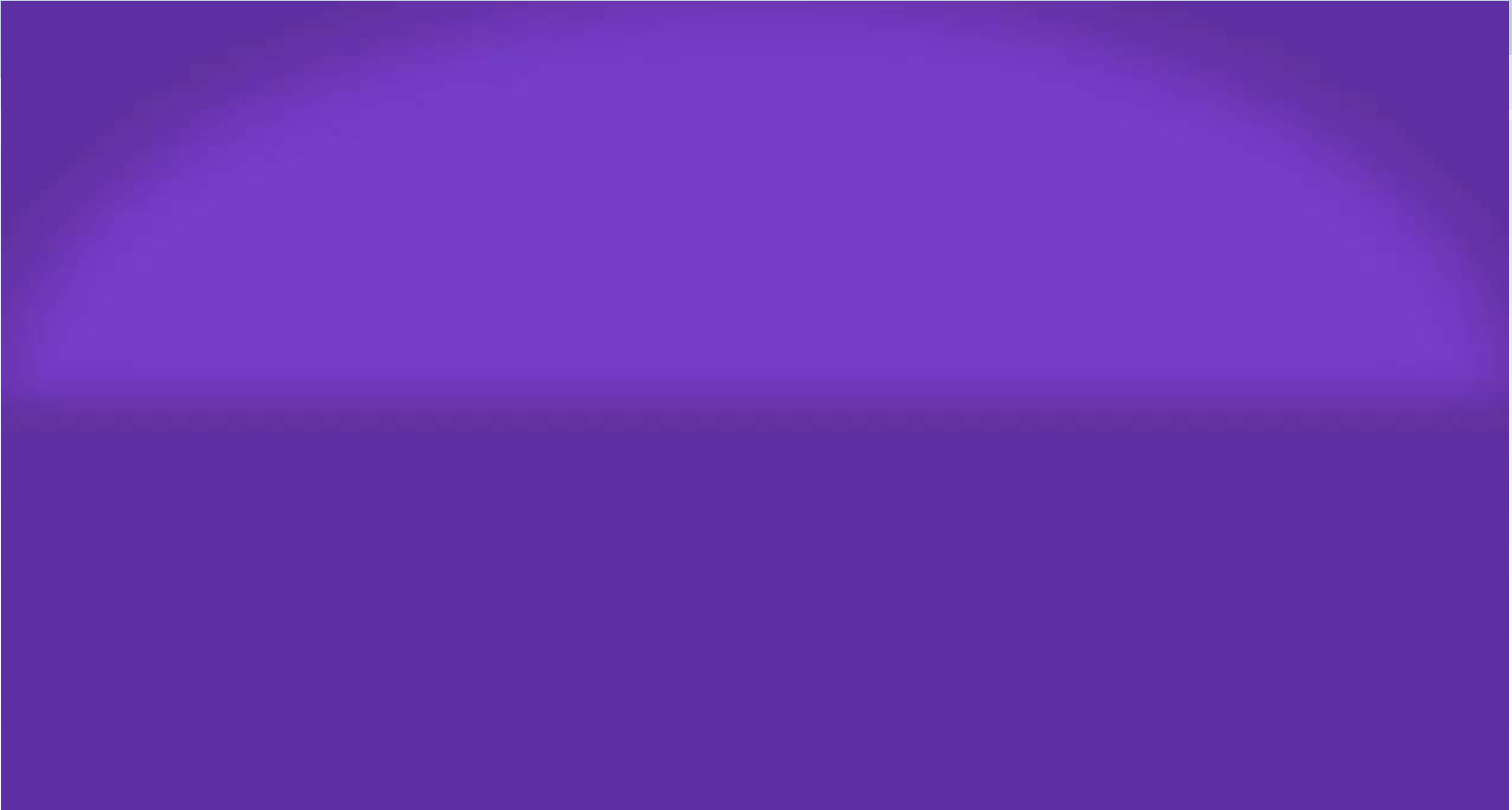
Sesi - 2

Ciri-ciri Public Speaker Yang Berhasil

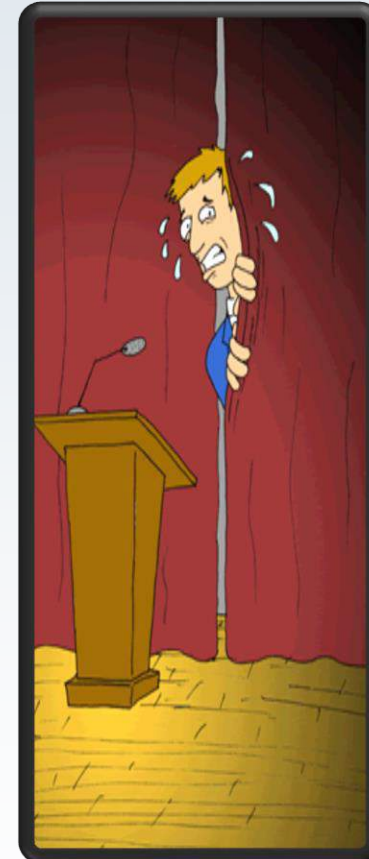
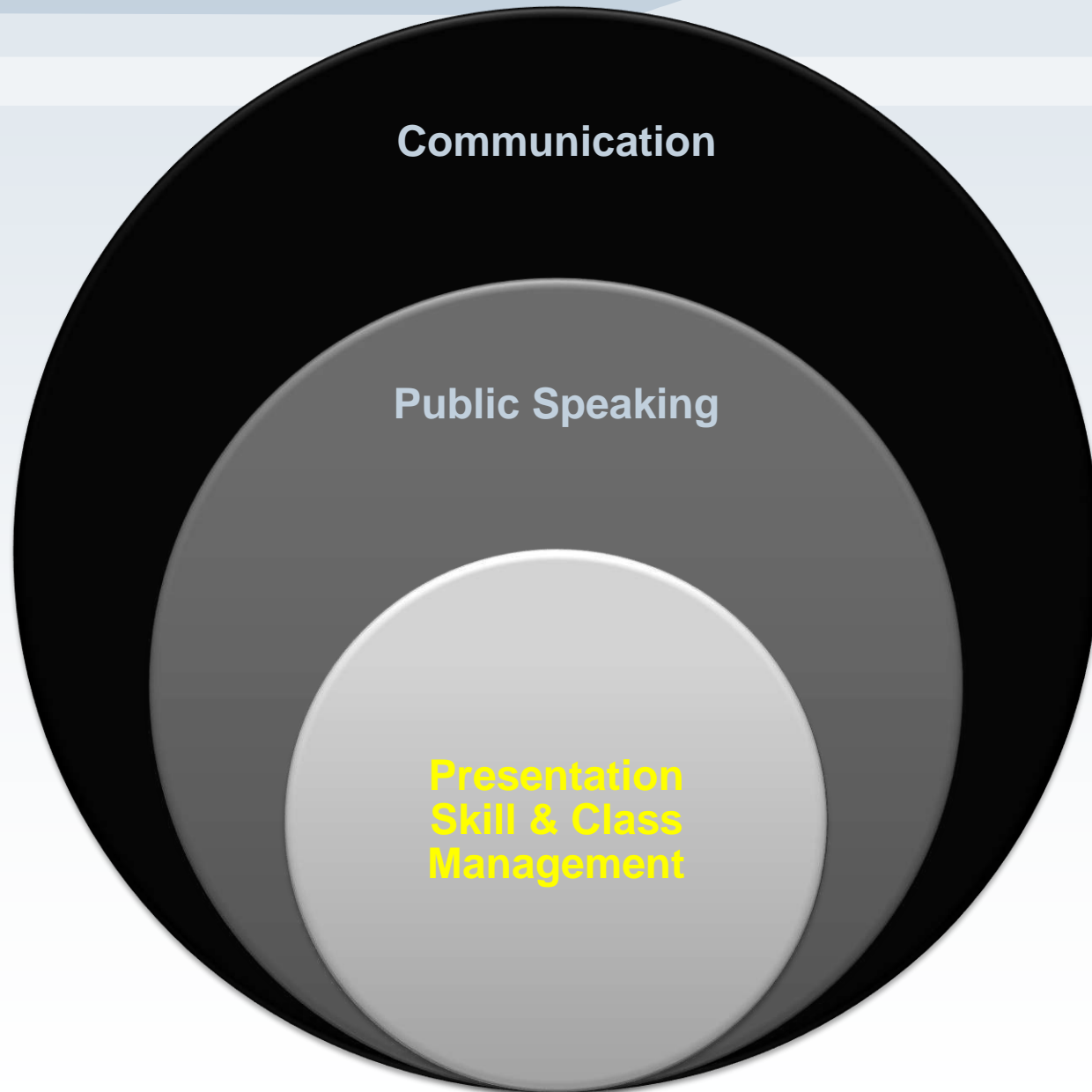


- Penguasaan materi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





Framework



Metode Pembelajaran Efektif



Hardware Preparation
(Belief system)

Fokus & Yakin bahwa setiap proses dalam Workshop ini akan meningkatkan kemampuan dan hidup anda



Learning Process (Program Installation)

Serap semua informasi tanpa ada keraguan / **otokritik, takut, minder, emosional**



Implementation Process
(Commissioning / Trial-Error & Evaluation)

Praktek, simulasi, **lakukan...lakukan....**dan lakukan bersama tim dengan keceriaan

The background is a dark blue field filled with vibrant, abstract shapes. There are several question marks and exclamation points in various colors including red, orange, green, and pink. Some shapes are solid, while others are outlined or have a gradient. The overall effect is one of dynamic energy and inquiry.

Ada pertanyaan



Teknik Presentasi Sukses: Penerapan 3V



Sesi - 3



- You can not not communicate.
- You do not communicate just words, but you are as a whole person.

Teknik Presentasi

Presentasi bukanlah sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga “MENJUAL IDE”

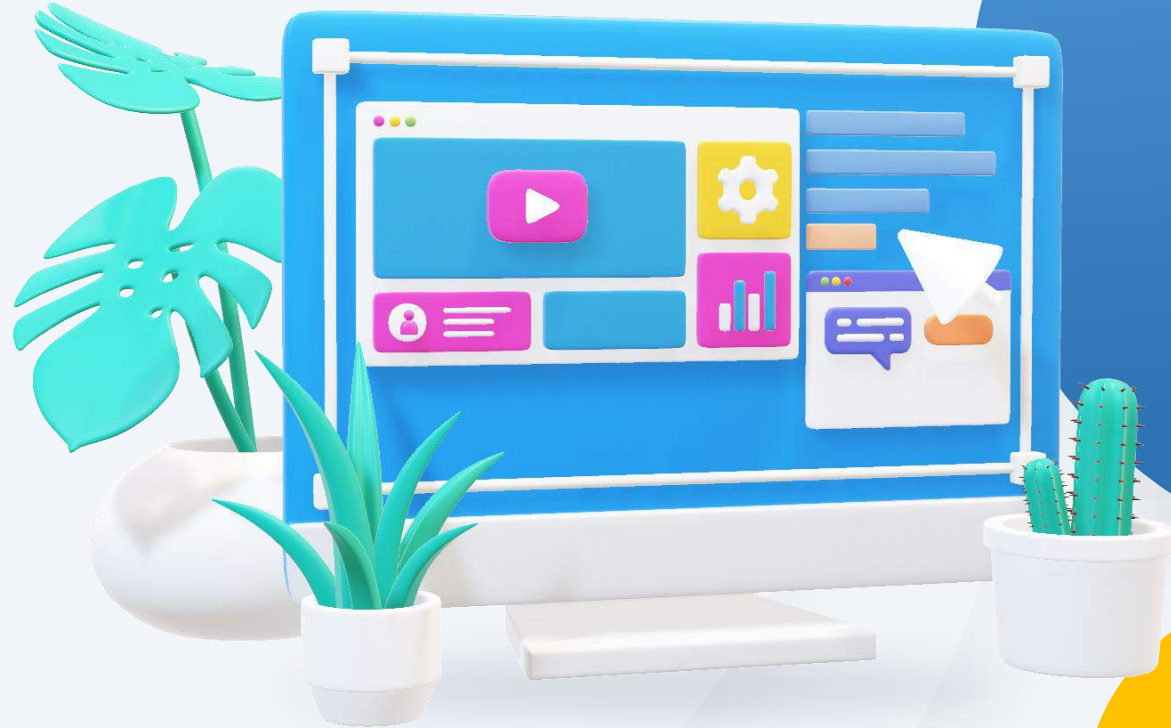
Tolok ukur keberhasilannya adalah idenya **dibeli** atau **tidak?**



- Komunikatif
- Menarik
- Meyakinkan

Rahasia Presentasi Yang sukses

Hasil Riset



55%
Visual

Gambar dan gerakan dalam menjelaskan materi

38%
Vocal

Irama, intonasi, dan cara berkata-kata

7%
Verbal
Kata-kata yang dipakai

Verbal : Apa yang dikatakan

- ✓ Perhatikan penggunaan jargon asing.
- ✓ Presentasikan dalam istilah yang sesuai dengan pengalaman audiens, sehingga menjadi relevan.
- ✓ Persuasi ide dengan membingkainya, bukan mengubah apa yang sudah mereka percayai sebelumnya (Sekaten, Wayang, Nyanyian-gamelan, dll)
- ✓ Orang tidak akan antusias dan tidak akan ingat jika presentasi hanya diberikan dengan data-data.
- ✓ Bingkai data dengan bahasa yang menggambarkan lebih jelas.
- ✓ Riset menunjukkan bahwa audiens lebih mudah menyerap informasi jika dijelaskan dengan bahasa yang lebih menggambarkan (gunakan words picture)



Words Picture



Menggunakan analogi

Kisah

Humor

Kiasan /
metafora

Asosiasi

Menggunakan ilustrasi

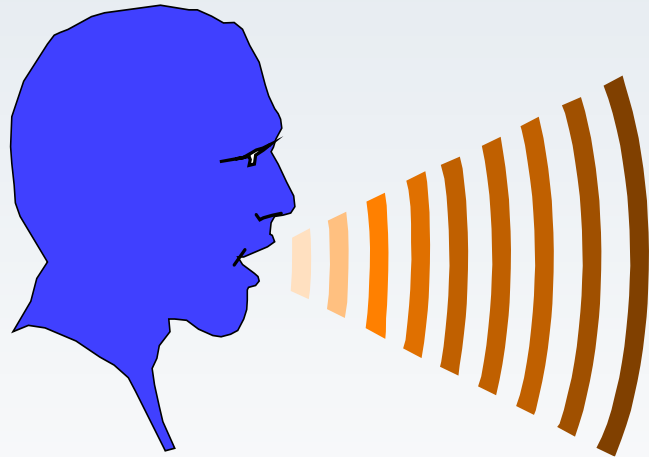
Statistik
yang tidak
biasa

Besar vs
Kecil

Warna vs
Tidak
Warna

Sederhana
vs Rumit

Vocal : Bagaimana anda mengatakan



Volume

Openness

Intonation

Confidence

Enthusiasm

Speed

Memainkan Intonasi, Nada, Tempo Suara dan Jeda

Untuk tujuan tertentu, seperti menekankan kata-kata yang penting, menumbuhkan perhatian, dan membuat tekanan psikologis, maka Speaker dapat melakukan “perubahan” suaranya dengan cara :

- intonasi me_{rendah}
- nada suara yang **berat**
- tempo yang cukup *p e l a n*
- penggunaan jeda



Mengolah Suara

Mis Lalan Menarik

Dinamis: Hidup, naik - turun sesuai topik

Lafal Terang & jelas : pengucapan yang tepat, terutama huruf2 : P, V, F, S, Sy

Lancar : Terkesan tidak seperti membaca

Menyenangkan : akrab, lembut, hangat

Natural : alamiah, jangan tampak dibuat - buat

Tarik nafas secara tepat : jangan terengah-engah



SMILING VOICE



- ✓ Suara yang menampilkan SENYUMAN
- ✓ Suara yang selalu membuat orang lain nyaman & bahagia
- ✓ Suara yang lebih menyehatkan (Peredaran darah di wajah lebih lancar, Tarikan Oksigen lebih banyak, Endorphin, Serotonin & Sel T diproduksi lebih banyak)
- ✓ Senyum = bahasa universal yang artinya saya sedang **senang**, saya **nyaman** ada disini dan akan memancarkan radiasi kehangatan & ramah

Visual : Apa yang dilihat

Body
Language

Visual
Aids

VISUAL
(Apa yang
dilihat)



Visual Aid : Pertimbangan penggunaan alat bantu visual

- ❖ Materi / data yang sulit dimengerti
- ❖ Menjelaskan daftar / urutan
- ❖ Menjelaskan bentuk
- ❖ Proses yang rumit
- ❖ Banyak materi yang harus diingat
- ❖ dll

Komputer

Barang bukti / model

Video

Proyektor / TV

Flip Chart

White Board

Hand-out

Pointer Laser

DII

Body Language

Pernahkah Anda ?

- ✓ Melihat seseorang dan langsung suka kepadanya ...
- ✓ Mendengarkan pembicaraan seseorang dan Anda percaya kepadanya padahal baru kenal...
- ✓ Melihat pembicara yang kata-katanya sangat impresif karena sesuai dengan pembawaannya ?



Pengertian Body Language

• Bagian dari komunikasi yang tidak disadari yang berpengaruh sangat besar pada hasil komunikasi.

• Perlu dipelajari agar dapat dioptimalkan dampaknya sesuai dengan tujuan komunikasi.

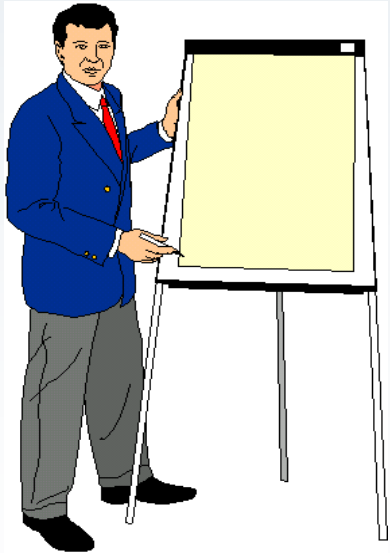
- Kontak Mata
- Ekspresi Wajah (Alis, senyum, dahi, anggukan kepala, pupil mata).
- Gerak Tubuh
- Sosok (Postur)
- dll



Manfaat mempelajari bahasa tubuh

Mempelajari mengenai bahasa tubuh berguna untuk :

- Memperbaiki penampilan diri
- Memperkuat inti pesan supaya lebih persuasif
- Membangun hubungan baik dengan audiens
- Mengetahui apakah audiens mulai bosan
- Mengetahui kapan harus berganti cara presentasi
- Dan lain-lain



Mengganggu-anggu

- Saat mengatakan sesuatu untuk mempengaruhi, maka usahakan anda sambil mengganggu pada kata-kata yang ingin anda tekankan.
- Kata-kata itu akan punya impresi bahwa hal itu terasa sebagai benar.
- Gunakan juga saat anda mendengarkan Peserta yang sedang berbicara.



Menguasai Gerakan Tangan

- Untuk meningkatkan impresi kata-kata, gerakkanlah tangan mengikuti kata yang anda jelaskan.
- Akan lebih mudah diingat.
- Gerakan tidak perlu terlalu mendetail

Misal:

- Pointing
- Keluar / Di luar
- Lebih bagus / kurang



Menyesuaikan ekspresi muka dengan emosi

Kekuatan kata-kata akan meningkat tajam, jika ekspresi muka disesuaikan dengan kata-kata yang mengandung emosi.

Misal:

- Anak adalah titipan Tuhan yang *sangat indah*
- *Berat sekali* perjuangan ini
- Lakukan dengan penuh *kesabaran*



Posisi Berdiri



- Berdiri tegak & seimbang
- Jangan menutupi papan tulis / screen ketika materi sedang ditampilkan
- Bergerak agar menguasai panggung
- Dekati peserta disaat perlu

Sikap Defensif

- ❖ Sikap defensif sering terjadi tanpa disengaja.
- ❖ Akan membuat orang lain jadi malas mendengarkan / menyimak presenter
- ❖ Memunculkan citra lemah.



Kontak mata

- Menjalinkan komunikasi timbal balik / audiens merasa dilibatkan
- Presenter 'tampak' menguasai situasi
- Menghindari kontak mata akan berkesan tidak percaya diri.
- Jangan memandangi eternit, lantai, tembok, white-board, sepatu anda saat sedang berbicara atau sedang mendengarkan peserta
- Saat mendengar pertanyaan lihat penanya, saat menjawab arahkan kontak mata dengan semua audiens
- Lakukan secara merata masing-masing sekitar 3 detik.





Managing Class:

- Formasi Kelas
- *Teknik Bertanya*
- Menangani Peserta Sulit
- Mengendalikan Kecemasan



Sesi - 4

6 Pengaturan Ruangan

Options One

Classroom style

Options Two

Modified classroom

Options Three

U-shape



Options Four

Clusters

Options Five

Open circle

Options Six

Boardroom style

PEDOMAN TEKNIK BERTANYA

Hindari pertanyaan yang menyerang

Awali bertanya kpd seluruh Peserta, "tunggu", dan lanjutkan dg bertanya kpd salah satu Peserta

Gunakan pertanyaan terbuka ketika pindah materi/ kesimpulan

Pertimbangkan sifat, kematangan & karakteristik Peserta

Jika Peserta yang ditunjuk tidak menjawab, tunjuk Peserta lainnya (karena bisa membuat Peserta "down")

Buatlah daftar pertanyaan terbuka yang bisa Anda ajukan untuk mulai membahas materi



Teknik Menangani Pertanyaan



Dorong Peserta untuk bertanya

Dengarkan dengan BAIK

RANGKUM, PERJELAS & KONFIRMASI Peserta atas rangkuman tsb

Jika Speaker tidak bisa menjawab, silakan lemparkan ke forum (Peserta lainnya) atau tanya kembali lebih dalam yang dimaksud Peserta tsb



TIPS Menjawab Pertanyaan



4 TRICK mengelola Umpan Balik/RESPON

One
Bentuklah suasana
POSITIF (Senyum,
sebut namanya)



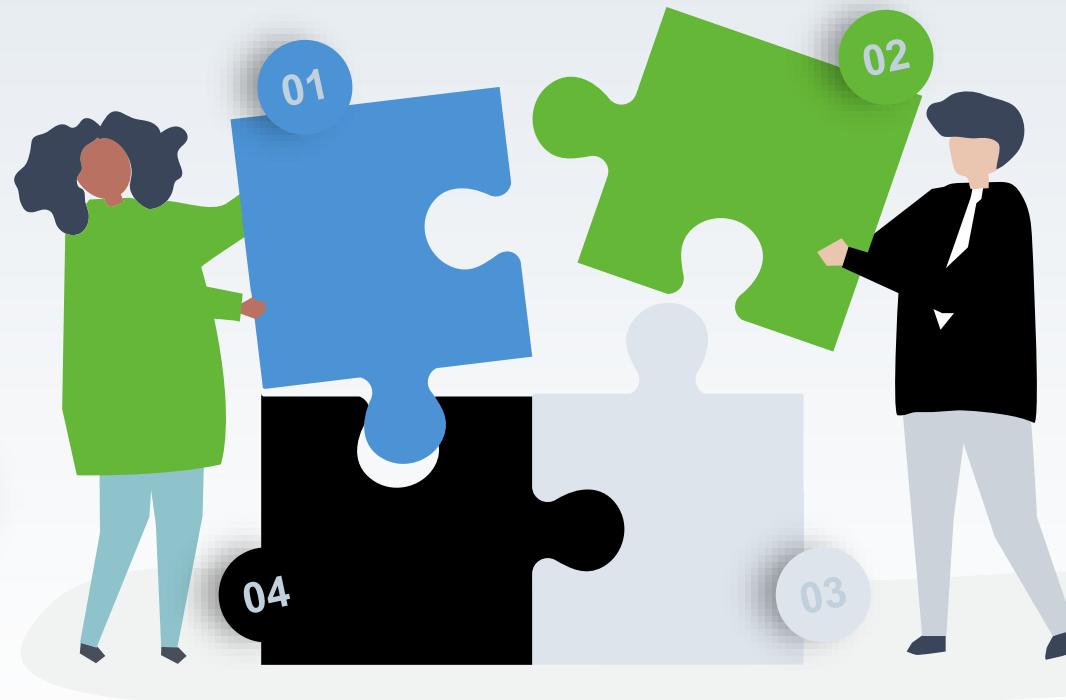
Two
Jangan
memperdebatkan
respon dari Peserta



Four
GUNAKAN kata
“MENURUT SAYA,
PENDAPAT SAYA”, jangan
katakan “kamu seharusnya,”



Three
Berikan respon yg
POSITIF, DETAIL & tidak
menyinggung perasaan
Peserta



7 TIPS mengelola Umpan Balik / RESPON



Cara-cara untuk Mengatasi Peserta Sulit dg **HATI**

Hindarilah debat kusir

Mulailah dengan ramah-tamah

BerEmpati dengan ide dan keinginan orla

Mulailah dengan hal-hal yang dapat disepakati bersama

Anda salah! Segera akui dengan simpatik

Usahakan agar orang lain berbicara lebih banyak

Dramatisir ide Anda


Buatlah ide datang dari orang lain


Berilah tantangan


Tulus melihat masalah dari kaca mata orang lain


Himbau pada motif yang mulia & relijius


5 Persiapan Sebelum Mendapat Peserta Sulit

 **1** Pahami segala sesuatu berkaitan materi Anda dalam perspektif peserta

 **2** Pahami titik kelemahan Anda sebagai Speaker dalam hal apa saja

 **3** Pikirkan pertanyaan / sanggahan yang mungkin timbul dari titik lemah tersebut (FAQ)

 **4** Siapkan jawaban atas pertanyaan atau sanggahan

 **5** Jawab pertanyaan atau sanggahan sebelum peserta yang SULIT mengajukannya

Mengendalikan kecemasan

- Persiapkan dengan matang,
- Praktekkan
- Siapkan catatan dan alat bantu,
- Bayangkan (gunakan tehnik Ilustrasi dalam SET)
- Coba latihan relaks dan mengatur nafas,
- Minum sedikit air putih untuk mencegah mulut kering,



Mengendalikan kecemasan



Sebelum mulai, jeda untuk beberapa detik,

Lakukan kontak pandangan,

Mulai dengan suara yang keras,

Bergerak dengan wajar,

Siapkan catatan jika dibutuhkan

Gunakan waktu rehat untuk memeriksa catatan, mempelajari catatan untuk sesi berikutnya, mencoba peralatan



Persiapan Praktek Perkenalan



Sesi: 5

Persiapan Praktek

1. Berpasangan
2. Menyapa & Perkenalan diri yg Meyakinkan
3. 5 menit
4. Siapkan alat bantu/alat peraga yg diperlukan (slide/flipchart, benda peraga, gambar).
5. Gunakan Kreativitas anda
6. Evaluasi & Saran





Improvement Plan :

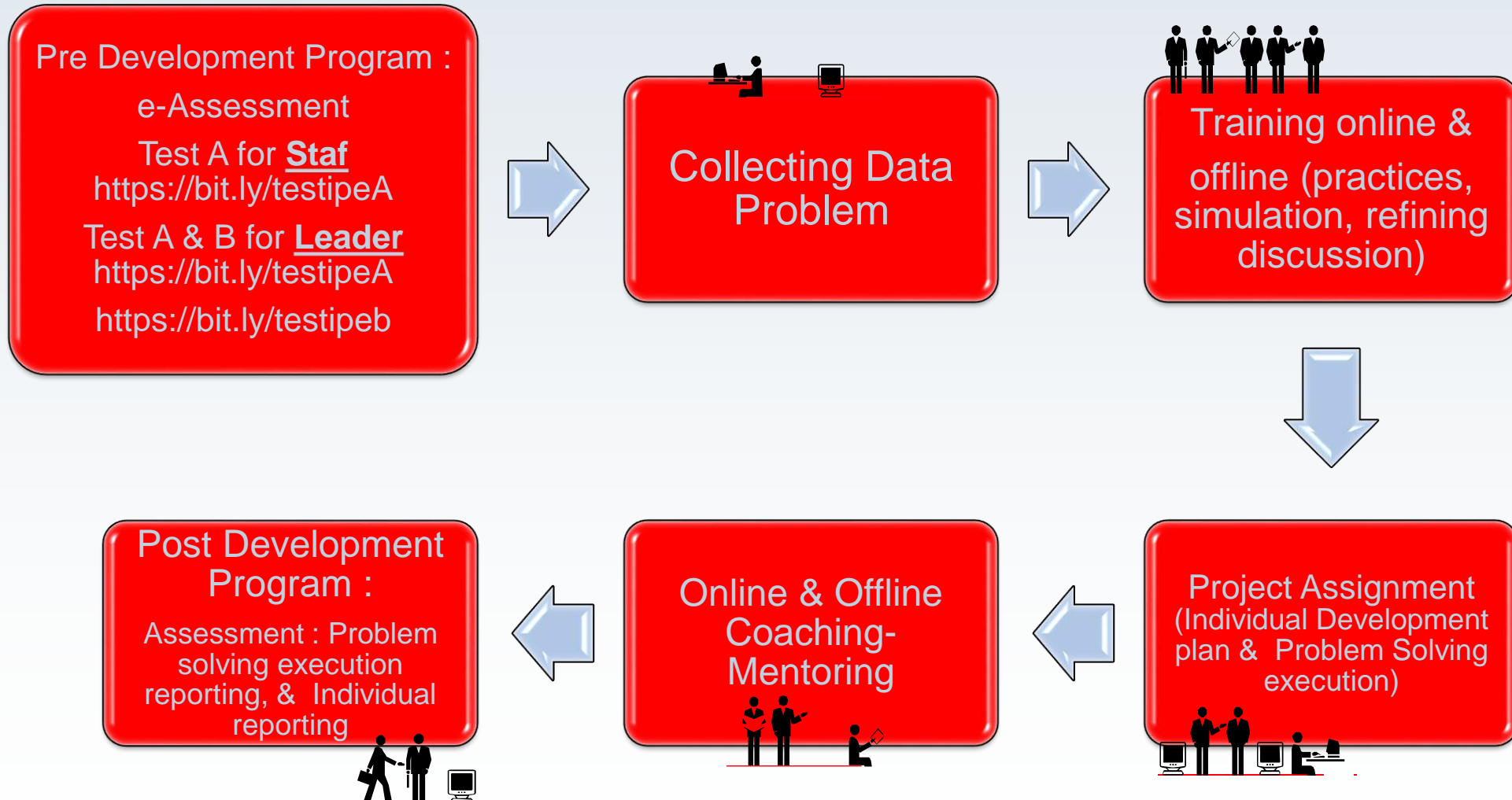
- *Organization Improvement Plan*
- *Individual improvement Plan*



Sesi - 6



Smart Learning Process



Organization Development Plan

No	Program	Due date	PIC
1	Adakan event briefing teknik memberikan instruksi yg detail kepada peserta bimbingan teknis		
2			
3			
4			
5			

Individual Development Plan

Individual Development Plan :

Every Peserta has an action plan after training to get more result (behavior, process quality, performance)



RENCANA TINDAKAN & EVALUASI TRAINING					
Nama / NIK					
Judul Training					
Tanggal Training					
No.	Special Assignment	Tanggal Pelaksanaan		Hasil Pencapaian	
		Mulai	Selesai		
1.					
2.					
3.					
No.	Penilaian	Bobot	Nilai	Bobot x Nilai	Keterangan :
1.		4			Nilai (1) : Tidak Sesuai Harapan
2.		3			Nilai (2) : Sesuai Harapan
3.		3			Nilai (3) : Melebihi Harapan
Total Akhir					Total Akhir > 15 = Hasil Training EFEKTIF
Hasil Training				Efektif / Tidak Efektif	(coret salah satu)
Peserta	Atasan/Pembimbing	Coach	Catatan/Rekomendasi		
Tanggal Penilaian					

Terima Kasih



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 131/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan Kegiatan
Trainers Convention

19 Januari 2023

Kepada Yth.

Pegawai Mahkamah Konstitusi

(Daftar Nama Terlampir)

di

Tempat

Dengan hormat, dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengikuti kegiatan ***Trainers Convention***, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu s.d. Sabtu, 25 s.d. 28 Januari 2023
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai (*jadwal terlampir*)
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall
Jalan Malabar No. 1B, Tegalleka Kec. Bogor Tengah
Kota Bogor, Jawa Barat

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu/Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Kepala Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Perpustakaan;
4. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.



Digital Signature
mk928713532230119031731

Lampiran I

Nomor : 131/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

DAFTAR PESERTA
TRAINERS CONVENTION

A. Kepaniteraan

1	Muhidin	12	Achmad Edi Subiyanto
2	Triyono Edy Budhiarto	13	Wilma Silalahi
3	Wiryanto	14	Ery Satria Pamungkas
4	Ida Ria Tambunan	15	Yunita Rhamadani
5	Saiful Anwar	16	Anak Agung Dian Onita
6	Rizki Amalia	17	Dian Chusnul Chatimah
7	Syukri Asy'ari	18	Fransisca
8	Dewi Nurul Savitri	19	Nurlidya Stephanny Hikmah
9	Hani Adhani	20	Jefri Porkonanta Tarigan
10	Mardian Wibowo	21	Rahadian Prima Nugraha
11	Ria Indriyani	22	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

B. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

23	Pan Mohamad Faiz Kusuma W.	35	Mohammad Mahrus Ali
24	Bisariyadi	36	Mery Christian Putri
25	Anna Triningsih	37	Zaka Firma Aditya
26	Oly Viana Agustine	38	Andriani Wahyuningtyas Novitasari
27	Nallom Kurniawan	39	Ananthia Ayu Devitasari
28	Irfan Nur Rachman	40	M. Lutfi Chakim
29	Luthfi Widagdo Eddyono	41	Rizkisyabana Yulistiyaputri
30	Abdul Ghoffar	42	Muhammad Reza Winata
31	Winda Wijayanti	43	Intan Permata Putri
32	Helmi Kasim	44	Abdul Basid Fuadi
33	Titis Anindyajati	45	Rima Yuwana Yustikaningrum



34 Alboin Pasaribu

46 Erlina Maria Christin Sinaga

C. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

47 Syamsudin Noer

57 Fenny Tri Purnamasari

48 Supriyanto

58 Rahmadiani Putri Nilasari

49 Siska Yosephin Sirait

59 Haifa Arief Lubis

50 Achmad Dodi Haryadi

60 Hersinta Setiarini

51 Siswantana Putri Rachmatika

61 Nuzul Qur'aini Mardiya

52 Indah Karmadaniah

62 Lia Nur Jannah

53 Suryo Gilang Romadlon

63 Muhammad Ramlan Aminuddin

54 Agusniwan Etra

64 Paulus Rudy Calvin Sinaga

55 Yunita Nurwulantari

65 Muhammad Doni Ramdani

56 Rio Tri Juli Putranto

D. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

66 Fajar Laksono

67 Adinda Rizky Putri Chaerunissa

E. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

68 Sigit Purnomo

81 Nahar Slamet

69 Nanda Adytiansyah

82 Agung Wisnu Laksono

70 Riska Aprian

83 Muhammad Radhi Zhafari

71 Sri Haryanti

84 Indra Pandu Wibowo Purwanto

72 Widy Hastowahyudi

85 Bobi Arianto

73 Mazmur Alexander Manik

86 Ishak Purnama

74 Taufik Gunanda

87 Rudi Kurniawan

75 Tarnoto

88 Rachman Karim

76 Nur Rakhman

89 Jamaludin Salam

77 Jeklin Indriani Br Purba

90 Hafidz Ikhsan Baihaki

78 Adam Ghuzalee Ramadhan

91 Aria Yudha

79 Muhamad Aussie

92 Lesmana Ramadon

80 Muhammad Ridho Ihsan

93 Jefriyanto



F. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

94	Imam Margono	102	Muhlis Nova
95	Nanang Subekti	103	Bangkit Panji Anarogo
96	Ardiansyah Salim	104	Chafid Sugianto
97	Santhy Kustrihardiani	105	Edwin Rivano
98	Bambang Sukmadi	106	Fazlur Rahman El Islamy
99	Melati Kusuma Wardani	107	Angga Putri Gardina
100	Hadian Taofik Rahman	108	Edwin Aditya Irawan
101	Yahya Amarullah Taufik	109	M. Hairuddin

G. Biro Perencanaan dan Keuangan

110	Tatang Garjito	116	Maria Ulfah Kusumaastuti
111	Endrizal	117	Yuni Nurhayati
112	Budi Hari Wibowo	118	Andi Aprilla Megananda Sanusi
113	Romi Sundara	119	Sarah
114	Chandra Okantara	120	Renando Piany Fazardo
115	Isti Widayanti		

H. Inspektorat

121	Kurniasih Panti Rahayu	123	Wijang Ardi Rahmadi
122	Dian Dwi Hapsoro		

I. Kementerian PPN/Bappenas



Lampiran II

Nomor : 131/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN *TRAINERS CONVENTION*

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Rabu, 25 Januari 2023	14.00 – 15.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Penyelenggara	Grand Ballroom Lantai PL
	15.00 – 15.30 WIB	Istirahat		
	15.30 – 16.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Plt. Sekretaris Jenderal	Grand Ballroom Lantai PL
	16.30 – 18.00 WIB	Sesi I : Arahan dan Kebijakan Ketua MK terkait Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU Tahun 2024	Ketua MK	Grand Ballroom Lantai PL
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Penyelenggara	



	19.00 – 21.00 WIB	Sesi II: Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD Tahun 2024 Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Tahun 2024	Narasumber: 1. YM Dr. Suhartoyo 2. YM Prof. Saldi Isra Moderator: Pan M. Faiz	Grand Ballroom Lantai PL
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Kamis, 26 Januari 2023	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan		Restoran Lantai PL
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi III: Sosialisasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu Tahun 2024	Narasumber: 1. KPU 2. Bawaslu Moderator: Nanang Subekti	Grand Ballroom Lantai PL
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi IV: <i>Public Speaking</i>		Grand Ballroom Lantai PL
	12.00 – 13.30 WIB	ISHOMA	Penyelenggara	
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi V: Penyampaian Kurikulum Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024	Narasumber: Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi Moderator: Ardiansyah Salim	Grand Ballroom Lantai PL



	15.30 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi VI: Diskusi Kurikulum Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024	Narasumber: Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi Moderator: Ardiansyah Salim	Grand Ballroom Lantai PL
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Penyelenggara	
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi VII: Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	Narasumber: 1. YM Prof. Arief Hidayat 2. YM Prof. Enny Nurbaningsih 3. YM Prof. M. Guntur Hamzah Moderator: PM II - Dr. Wiryanto	Grand Ballroom Lantai PL
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
Jumat, 27 Januari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Sarapan		Restoran Lantai PL
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VIII: Sosialisasi PMK Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU Tahun 2024	Narasumber: 1. Panitera 2. Plt. Sekretaris Jenderal Moderator: PM I - Triyono Edy	Grand Ballroom Lantai PL
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		



	10.00 – 12.00 WIB	Sesi IX: Pembahasan Teknis dan Bahan Penyelenggaraan Bimtek	Narasumber: 1. Mardian Wibowo 2. Syukri Asy'ari 3. M. Mahrus Ali 4. Bisariyadi	Grand Ballroom Lantai PL
	12.00 – 13.30 WIB	ISHOMA	Penyelenggara	
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi X: Lanjutan Pembahasan Teknis dan Bahan Penyelenggaraan Bimtek	Narasumber: 1. Mardian Wibowo 2. Syukri Asy'ari 3. M. Mahrus Ali 4. Bisariyadi	Grand Ballroom Lantai PL
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 17.00 WIB	Sesi XI: Lanjutan Pembahasan Teknis dan Bahan Penyelenggaraan Bimtek	Narasumber: 1. Mardian Wibowo 2. Syukri Asy'ari 3. M. Mahrus Ali 4. Bisariyadi	Grand Ballroom Lantai PL
	17.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Sabtu, 28 Januari 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan		



08.00 – 10.00 WIB	Penutupan 1. Laporan Plt. Kapusdik 2. Sambutan Penutupan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 3. Pembacaan Doa	Plt. Sekretaris Jenderal Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Grand Ballroom Lantai PL
10.00 – 12.00 WIB	Check out		





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 135/DK.06.00/01/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

19 Januari 2023

Kepada,
YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B,
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi : Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk735107244230119033522

Lampiran I

Nomor : 135/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023

Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Kamis, 26 Januari 2023	19.00 – 21.00	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Narasumber: –YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. –YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. –YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 140/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

20 Januari 2023

Kepada,
Ketua Komisi Pemilihan Umum RI
Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan 1 (satu) orang pejabat Komisi Pemilihan Umum RI untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Grand Ballroom, Lantai PL
Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B,
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi : Sosialisasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu Tahun
2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth:
Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk359039427230119035406

Lampiran I

Nomor : 140/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
TRAINING OF CONVENTION NARASUMBER DAN FASILITATOR
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023

Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Kamis, 26 Januari 2023	07.30 – 09.30	Sosialisasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu Tahun 2024	Narasumber: KPU & Bawaslu
	09.30 – 10.00	<i>Coffee Break</i>	Penyelenggara



NO	MATERI	NARASUMBER	DURASI
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 • Sistem Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 • Tantangan Pemilu Tahun 2024 	Narasumber: KPU	45 MENIT
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pengawasan Pemilu Tahun 2024 • Indeks Kerawanan Pemilu • Tantangan Pemilu Tahun 2024 	Narasumber: Bawaslu	45 MENIT





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 141/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

20 Januari 2023

Kepada,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
Rahmat Bagja, S.H., LL.M
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan 1 (satu) orang pejabat Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B,
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi : Sosialisasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu Tahun
2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth:
Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-2112530873230119035703

Lampiran I

Nomor : 141/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Kamis, 26 Januari 2023	07.30 – 09.30	Sosialisasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu Tahun 2024	Narasumber: KPU & Bawaslu
	09.30 – 10.00	<i>Coffee Break</i>	Penyelenggara



NO	MATERI	NARASUMBER	DURASI
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 • Sistem Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 • Tantangan Pemilu Tahun 2024 	Narasumber: KPU	45 MENIT
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pengawasan Pemilu Tahun 2024 • Indeks Kerawanan Pemilu • Tantangan Pemilu Tahun 2024 	Narasumber: Bawaslu	45 MENIT





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 142/DK.06.00/01/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

20 Januari 2023

Kepada,
Panitera Mahkamah Konstitusi
Bapak Muhidin
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Waktu : 09.45 – 11.45 WIB
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B,
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi : Sosialisasi PMK Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tahapan dan
Jadwal Penanganan Perkara PHPU

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth:
Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk776196494230120110818

Lampiran I

Nomor : 142/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Jumat, 27 Januari 2023	09.45 – 11.45	Sosialisasi PMK Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU	Narasumber: –Panitera MK –Plt Sekretaris Jenderal MK





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 143/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

20 Januari 2023

Kepada,
Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Bapak Heru Setiawan
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Waktu : 09.45 – 11.45 WIB
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B,
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi : Sosialisasi PMK Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tahapan dan
Jadwal Penanganan Perkara PHPU

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth:
Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk381193330230120110720

Lampiran I

Nomor : 143/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Jumat, 27 Januari 2023	09.45 – 11.45	Sosialisasi PMK Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU	Narasumber: –Panitera MK –Plt Sekretaris Jenderal MK





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 145/DK.06.00/01/2023
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

20 Januari 2023

Kepada Yth.

Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
di Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan *Trainers Convention* dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat teknis persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Januari 2023
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Grha Konstitusi 2
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Agenda : Rapat Persiapan Kegiatan *Trainers Convention*

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-829299190230120113852



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 147/DK.06.00/01/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

20 Januari 2023

Kepada,
YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B,
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi : Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum DPD

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk59824936230120085552

Lampiran I

Nomor : 147/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Jumat, 27 Januari 2023	07.30 – 09.30	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD	Narasumber: –YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA –YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum –YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 148/DK.06.00/01/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

20 Januari 2023

Kepada,
YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B,
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi : Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum DPD

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1363607580230120085414

Lampiran I

Nomor : 148/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Jumat, 27 Januari 2023	07.30 – 09.30	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD	Narasumber: –YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA –YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum –YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 149/DK.06.00/01/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

20 Januari 2023

Kepada,
YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B,
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi : Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum DPD

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-208919655230120085202

Lampiran I

Nomor : 149/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Jumat, 27 Januari 2023	07.30 – 09.30	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD	Narasumber: –YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA –YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum –YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 151/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

20 Januari 2023

Kepada,
YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Grand Ballroom, Lantai PL
Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B,
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi : Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum DPR, DPRD

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1801936977230120084931

Lampiran I

Nomor : 151/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Tempat : Grand Ballroom, Lantai PL
Bigland Hotel Int'l & Convention Hall

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Rabu, 25 Januari 2023	19.00 – 21.00	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD	Narasumber: YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 152/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

20 Januari 2023

Kepada,
YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PPHU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Grand Ballroom, Lantai PL
Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B,
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi : Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum DPR, DPRD

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1864549737230120084727

Lampiran I

Nomor : 152/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Tempat : Grand Ballroom, Lantai PL
Bigland Hotel Int'l & Convention Hall

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Rabu, 25 Januari 2023	19.00 – 21.00	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD	Narasumber: YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 153/DK.06.00/01/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

20 Januari 2023

Kepada,
YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B,
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi : Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1136252348230119034759

Lampiran I

Nomor : 153/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023

Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Kamis, 26 Januari 2023	19.00 – 21.00	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Narasumber: –YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. –YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. –YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 154/DK.06.00/01/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

20 Januari 2023

Kepada,
YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B,
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi : Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk971094390230119034602

Lampiran I

Nomor : 154/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 20 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
***TRAINING OF CONVENTION* NARASUMBER DAN FASILITATOR**
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023

Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Kamis, 26 Januari 2023	19.00 – 21.00	Sosialisasi PMK mengenai Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Narasumber: –YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. –YM. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. –YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 155/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Laporan
Pembukaan**

24 Januari 2023

Kepada,
Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Bapak Heru Setiawan
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menyampaikan laporan dalam pembukaan kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Waktu : 15.30 s.d. 16.30 WIB
Tempat : Grand Ballroom, Lantai PL
Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B,
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono



Digital Signature
mk10405524230120041555

Lampiran I

Nomor : 155/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 24 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
TRAINING OF CONVENTION NARASUMBER DAN FASILITATOR
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Tempat : Grand Ballroom, Lantai PL
Bigland Hotel Int'l & Convention Hall

HARI	WAKTU	MATERI	NARASUMBER
Rabu, 25 Januari 2023	15.30 – 16.30	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	- YM Ketua MK - Plt. Sekjen





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 155/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan
Sambutan Penutupan**

24 Januari 2023

Kepada,
Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Bapak Heru Setiawan
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menyampaikan sambutan dan menutup kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 28 Januari 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Grand Ballroom, Lantai PL
Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B,
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono



Digital Signature
mk1040552424230120041646

Lampiran I

Nomor : 155/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 24 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
TRAINING OF CONVENTION NARASUMBER DAN FASILITATOR
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Sabtu, 28 Januari 2023
Tempat : Grand Ballroom, Lantai PL
Bigland Hotel Int'l & Convention Hall

HARI	WAKTU	MATERI	NARASUMBER
Sabtu, 28 Januari 2023	08.00 – 10.00	Penutupan 1. Laporan Plt. Kapusdik 2. Sambutan Penutupan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 3. Pembacaan Doa	- Plt. Sekretaris Jenderal - Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 163/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

25 Januari 2023

Kepada,
Managing Director AIDA Consultant
Bapak Mohamad Soleh, S.Psi, MM, CNLP, CRGP
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan *Trainers Convention* bagi Calon Narasumber/Fasilitator Bimbingan Teknis PPHU Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak dan tim untuk menjadi narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 26 Januari 2023
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B,
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
Materi : *Public Speaking*

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth:
Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1335764117230125113632

Lampiran I

Nomor : 163/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 25 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
TRAINING OF CONVENTION NARASUMBER DAN FASILITATOR
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Hari, Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023

Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall, Jalan Malabar No. 1B
Tegallega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Kamis, 26 Januari 2023	10.00 – 12.00	<i>Public Speaking</i>	Tim PT. AIDA Infini Maksima





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEDANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 188/DK.00/01/2023

10 Januari 2023

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : **Undangan Rapat Persiapan TC**

Pegawai Mahkamah Konstitusi
(Nama Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Bimbingan Teknis PHPU Tahun 2023, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun konsep kegiatan *trainers convention* yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 29 Januari 2023. Kegiatan *trainers convention* bertujuan untuk memberikan panduan kepada para calon narasumber dan fasilitator pada saat memberikan materi pada Bimtek PHPU. Untuk itu kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menghadiri rapat koordinasi pembahasan persiapan kegiatan *trainers convention* yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis s.d. Jumat, 12 s.d. 13 Januari 2022
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Agenda : Pembahasan Persiapan *Trainers Convention*
Tempat : Grha Konstitusi III
Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan :

Yth. Bapak Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-991911253230110080734

Lampiran Surat

Nomor : 188/DK.00/01/2023

Tanggal : 10 Januari 2023

Daftar Peserta Rapat

1	Muhidin	19	Melati Kusuma Wardani
2	Triyono Edy Budhiarto	20	Nanda Adityansyah
3	Wiryanto	21	Muhlis Nova
4	Ida Ria Tambunan	22	Yahya Amarullah Taufik
5	Imam Margono	23	Hadian Taofik Rahman
6	Nanang Subekti	24	Bangkit Panji Anarogo
7	Syukri Asyari	25	Chafid Sugianto
8	Saiful Anwar	26	Edwin Rivano
9	Rizki Amalia	27	Fazlur Rahman El Islamy
10	Mardian Wibowo	28	Suhardi
11	Achmad Edi Subiyanto	29	Angga Putri Gardina
12	Bisariyadi	30	Edwin Aditya
13	Pan M. Faiz	31	Achmad Dodi Haryadi
14	M. Mahrus Ali	32	Muhammad Ramlan
15	Ardiansyah Salim	33	Adinda Rizky Putri
16	Santhy Kustrihardiani	34	Tarnoto
17	Wilma Silalahi	35	Jeklin Indriani
18	Bambang Sukmadi	36	Ishak Purnama
		37	Rudi Kurniawan





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

SURAT TUGAS

42/2000/01/2023

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan *Trainers Convention* Bimbingan Teknis Pemilihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu adanya narasumber dalam kegiatan tersebut;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai narasumber dalam kegiatan *Trainers Convention* Bimbingan Teknis Pemilihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
- Hari/tanggal : Rabu s.d. Sabtu/ 25 s.d. 28 Januari 2023
- Waktu : **Jadwal Terlampir**
- Tempat : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall Jalan Malabar No. 1B, Tegallega
Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat
- Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 24 Januari 2023

a.n. Ketua

Plt. Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan



Digital Signature
mk-423261528230130111749

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 42/2000/01/2023
Tanggal: 24 Januari 2023

Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	25 Januari 2023
2	Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.	Narasumber	26 Januari 2023
3	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	25 Januari 2023
4	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H.	Narasumber	25 Januari 2023
5	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Narasumber	26 Januari 2023
6	Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Narasumber	27 Januari 2023
7	Totok Hariyono, S.H.	Narasumber	26 Januari 2023
8	Andi Krisna, S.Sos., M.M.	Narasumber	26 Januari 2023
9	Mushaddiq Amir	Narasumber	27 Januari 2023





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 20/ST.SPD/2000/01/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

- Dari** : Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta dan
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
- Tempat, Kota Tujuan** : Bigland Hotel Int'l & Convention Hall
Jalan Malabar No. 1B, Tegallega Kec. Bogor Tengah
Kota Bogor, Jawa Barat
- Dalam rangka** : Melaksanakan Tugas Sebagai Peserta Pada Kegiatan
Trainers Convention Bimbingan Teknis Pemilihan Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2023 di Bigland Hotel Int'l &
Convention Hall Bogor pada tanggal 25 s.d. 28 Januari 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, **24 Januari 2023**

Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,

Heru Setiawan



Digital Signature
mk1925125690230124122358

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 20/ST.SPD/2000/01/2023

Tanggal : 24 Januari 2023

**DAFTAR PESERTA KEGIATAN TRAINERS CONVENTION
BIMBINGAN TEKNIS PEMILIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan	Tanggal Perjalanan Dinas	Tempat Kedudukan
KEPANITERAAN				
1	Muhidin	Panitera	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
2	Triyono Edy Budhiarto	Panitera Muda I	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
3	Wiryanto	Panitera Muda II	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
4	Ida Ria Tambunan	Panitera Muda III	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
5	Saiful Anwar	Panitera Pengganti Tk. I	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
6	Rizki Amalia	Panitera Pengganti Tk. I	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
7	Syukri Asy'ari	Panitera Pengganti Tk. I	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
8	Dewi Nurul Savitri	Panitera Pengganti Tk. II	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
9	Hani Adhani	Panitera Pengganti Tk. II	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
10	Mardian Wibowo	Panitera Pengganti Tk. II	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
11	Ria Indriyani	Panitera Pengganti Tk. II	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
12	Achmad Edi Subiyanto	Panitera Pengganti Tk. II	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
13	Wilma Silalahi	Panitera Pengganti Tk. II	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
14	Ery Satria Pamungkas	Panitera Pengganti Tk. II	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta



15	Yunita Rhamadani	Panitera Pengganti Tk. II	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
16	Anak Agung Dian Onita	Panitera Pengganti Tk. II	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
17	Dian Chusnul Chatimah	Panitera Pengganti Tk. II	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
18	Fransisca	Panitera Pengganti Tk. II	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
19	Nurlidya Stephanny Hikmah	Panitera Pengganti Tk. II	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
20	Jefri Porkonanta Tarigan	Panitera Pengganti Tk. II	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
21	Rahadian Prima Nugraha	Panitera Pengganti Tk. II	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
22	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa	Panitera Pengganti Tk. II	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
PUSAT PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN				
23	Pan Mohamad Faiz Kusuma W.	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
24	Anna Triningsih	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
25	Oly Viana Agustine	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
26	Nallom Kurniawan	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
27	Irfan Nur Rachman	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
28	Luthfi Widagdo Eddyono	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
29	Abdul Ghoffar	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
30	Winda Wijayanti	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
31	Helmi Kasim	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
32	Titis Anindyajati	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
33	Alboin Pasaribu	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
34	Mohammad Mahrus Ali	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta



35	Mery Christian Putri	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
36	Zaka Firma Aditya	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
37	Andriani Wahyuningtyas Novitasari	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
38	Ananthia Ayu Devitasari	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
39	Rizkisyabana Yulistya Putri	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
40	Muhammad Reza Winata	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
41	Intan Permata Putri	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
42	Abdul Basid Fuadi	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
43	Rima Yuwana Yustikaningrum	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN				
44	Syamsudin Noer	Pengadministrasi Registrasi Perkara	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
45	Supriyanto	Pengelola Persidangan	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
46	Siska Yosephin Sirait	Pengelola Persidangan	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
47	Achmad Dodi Haryadi	Pengelola Persidangan	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
48	Siswantana Putri Rachmatika	Pengolah Data Perkara dan Putusan	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
49	Indah Karmadaniah	Pengolah Data Perkara dan Putusan	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
50	Suryo Gilang Romadlon	Pengolah Data Perkara dan Putusan	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
51	Agusniwan Etra	Pengolah Data Perkara dan Putusan	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
52	Yunita Nurwulantari	Pengolah Data Perkara dan Putusan	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
53	Rio Tri Juli Putranto	Juru Panggil	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta



54	Fenny Tri Purnamasari	Juru Panggil	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
55	Haifa Arief Lubis	Analisis Hukum	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
56	Hersinta Setiarini	Pengolah Data Perkara dan Putusan	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
57	Nuzul Qur'aini Mardiya	Pengadministrasi Registrasi Perkara	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
58	Lia Nur Jannah	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang- Undangan	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
59	Muhammad Ramlan Aminuddin	Analisis Hukum	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
60	Paulus Rudy Calvin Sinaga	Analisis Hukum	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
61	Muhammad Doni Ramdani	Pengolah Data Perkara dan Putusan	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL				
62	Fajar Laksono	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
63	Adinda Rizky Putri Chaerunissa	Sekretaris Panitera	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
PUSAT TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI				
64	Sigit Purnomo	Plt. Kepala Pusat Taknologi Informasi dan Komunikasi	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
65	Jefriyanto	Kepala Sub Bagian Tata Usaha PUSTIK	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
66	Nanda Adytiansyah	Pranata Komputer Ahli Madya	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
67	Riska Aprian	Pranata Komputer Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
68	Sri Haryanti	Pranata Komputer Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
69	Widy Hastowahyudi	Pranata Komputer Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta



70	Mazmur Alexander Manik	Pranata Komputer Ahli Muda	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
71	Taufik Gunanda	Pranata Komputer Ahli Pertama	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
72	Tarnoto	Pranata Komputer Ahli Pertama	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
73	Nur Rakhman	Pranata Komputer Ahli Pertama	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
74	Jeklin Indriani Br Purba	Pranata Komputer Ahli Pertama	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
75	Adam Ghuzalee Ramadhan	Pranata Komputer Ahli Pertama	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
76	Muhamad Aussie	Pranata Komputer Ahli Pertama	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
77	Muhammad Ridho Ihsan	Pranata Komputer Ahli Pertama	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
78	Nahar Slamet	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
79	Agung Wisnu Laksono	Pengelola Instalasi TI	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
80	Muhammad Radhi Zhafari	Pengelola Instalasi TI	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
81	Indra Pandu Wibowo Purwanto	Pengelola Instalasi TI	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
82	Bobi Arianto	Pengelola Situs Web	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
83	Ishak Purnama	Programmer	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
84	Rudi Kurniawan	Programmer	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
85	Rachman Karim	Programmer	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
86	Jamaludin Salam	Programmer	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
87	Hafidz Ikhsan Baihaki	Programmer	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
88	Aria Yudha	Network Engineer	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
89	Lesmana Ramadan	Network Engineer	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI				



90	Imam Margono	Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	25 s.d. 28 Januari 2023	Kabupaten Bogor
91	Nanang Subekti	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	25 s.d. 28 Januari 2023	Kabupaten Bogor
92	Ardiansyah Salim	Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi	25 s.d. 28 Januari 2023	Kabupaten Bogor
93	Santhy Kustrihardiani	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan	25 s.d. 28 Januari 2023	Kabupaten Bogor
94	Bambang Sukmadi	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana	25 s.d. 28 Januari 2023	Kabupaten Bogor
95	Melati Kusuma Wardani	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	25 s.d. 28 Januari 2023	Kabupaten Bogor
96	Hadian Taofik Rahman	Pengelola Keuangan	25 s.d. 28 Januari 2023	Kabupaten Bogor
97	Yahya Amarullah Taufik	Penyusun Rencana Ke	25 s.d. 28 Januari 2023	Kabupaten Bogor
98	Muhlis Nova	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	25 s.d. 28 Januari 2023	Kabupaten Bogor
99	Bangkit Panji Anarogo	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	25 s.d. 28 Januari 2023	Kabupaten Bogor
100	Chafid Sugianto	Analisis Tata Usaha	25 s.d. 28 Januari 2023	Kabupaten Bogor
101	Edwin Rivano	Pengelola Asrama	25 s.d. 28 Januari 2023	Kabupaten Bogor
102	Fazlur Rahman El Islamy	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	25 s.d. 28 Januari 2023	Kabupaten Bogor
103	Angga Putri Gardina	Penyusun Laporan Hasil Diklat	25 s.d. 28 Januari 2023	Kabupaten Bogor
104	Edwin Aditya Irawan	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	25 s.d. 28 Januari 2023	Kabupaten Bogor
105	M. Hairuddin	Perawat	25 s.d. 28 Januari 2023	Kabupaten Bogor
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN				
106	Tatang Garjito	Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	27 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
107	Endrizal	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi	27 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta



108	Budi Hari Wibowo	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
109	Romi Sundara	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
110	Chandra Okantara	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
111	Sylvia Yuliani	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	25 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
112	Isti Widayanti	Kepala Bagian Keuangan	27 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
113	Maria Ulfah Kusumaastuti	Kepala Sub Bagian Verifikasi	27 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
114	Yuni Nurhayati	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	27 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
115	Andi Aprilla Megananda Sanusi	Bendahara	27 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
116	Sarah	Bendahara	27 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
117	Renando Piany Fazardo	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	27 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
INSPEKTORAT				
118	Kurniasih Panti Rahayu	Plt. Inspektur	27 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
119	Dian Dwi Hapsoro	Auditor Ahli Muda	27 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
120	Wijang Ardi Rahmadi	Auditor Ahli Pertama	27 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta
121	Amelia Desy Ratna Yuwita	Auditor Ahli Pertama	27 s.d. 28 Januari 2023	Jakarta



DATA PESERTA KEGIATAN

TRAINERS CONVENTION PERSIAPAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	Pendidikan	Jabatan
1	Romi Sundara, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
2	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi	S2	Panitera Pengganti Tk. II
3	Chandra Okantara, S.E.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
4	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi	S2	Panitera Pengganti Tk. II
5	Rachman Karim	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Senior Programmer
6	Intan Permata Putri, S.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda 02
7	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda 02
8	Lesmana Ramadan	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Network Engineer (CCNA Certified)
9	Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda 02
10	Zaka Firma Aditya, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda 02
11	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi	S3	Panitera Pengganti Tk. II
12	Jamaludin Salam	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Programmer
13	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi	S2	Panitera Muda III
14	Dewi Nurul Savitri, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi	S2	Panitera Pengganti Tk. II
15	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi	S3	Panitera Pengganti Tk. II
16	Lia Nur Jannah, S.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
17	Hersinta Setiarini, S.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Pengolah Data Perkara dan Putusan
18	Haifa Arief Lubis, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Analisis Hukum
19	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda 01
20	Jefriyanto, S.H., M.Kn.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
21	Ishak Purnama	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Senior Programmer
22	Indra Pandu Wibowo Purwanto, A.Md.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	DIII	Pengelola Situs Web
23	Tarnoto, S.Kom.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Pranata Komputer Ahli Pertama
24	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi	S2	Panitera Pengganti Tk. II
25	Nuzul Qur'aini Mardiyah, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Pengadministrasi Registrasi Perkara
26	Hafidz Ikhsan Baihaki	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Programmer
27	Agung Wisnu Laksono, A.Md.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	DIII	Pengelola Instalasi TI
28	Adam Ghuzale Ramadhan, S.Kom.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Pranata Komputer Ahli Pertama
29	Aria Yudha	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Network Engineer (CCNP Certified)
30	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi	S2	Panitera Pengganti Tk. II
31	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi	S2	Panitera Pengganti Tk. I
32	NurliDYa Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi	S2	Panitera Pengganti Tk. II
33	Indah Karmadaniah, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Pengolah Data Perkara dan Putusan
34	Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi	S2	Panitera Pengganti Tk. I
35	Hani Adhani, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi	S2	Panitera Pengganti Tk. II
36	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi	S2	Panitera Pengganti Tk. I
37	Budi Hari Wibowo, S.A.P., M.A.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Kepala Subbagian Program dan Anggaran
38	Riska Aprian, S.T., M.Kom.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Pranata Komputer Ahli Muda
39	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi	S1	Panitera Muda I
40	Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya
41	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi	S3	Panitera Pengganti Tk. II
42	Muhammad Reza Winata, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda 02
43	Muhamad Doni Ramdani, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Pengolah Data Perkara dan Putusan
44	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S3	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri
45	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Pranata Komputer Ahli Madya
46	Angga Putri Gardina, S.Pd.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Penyusun Laporan Hasil Diklat
47	Fransisca, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi	S2	Panitera Pengganti Tk. II
48	Imam Margono, S.E., M.M.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
49	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi	S3	Panitera Pengganti Tk. II
50	Nanang Subekti, S.E., M.S.E.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik
51	Melati Kusuma Wardani, S.I.P., M.A.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

52	Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
53	Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi
54	Santhy Kustrihardiani, S.Psi.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan
55	Muhammad Radhi Zhafari, A.Md.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	DIII	Pengelola Instalasi TI
56	Hadian Taofik Rochman, S.Sos., M.A.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Pengelola Keuangan
57	Chafid Sugianto, S.Pd., M.Pd.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Analisis Tata Usaha Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
58	Edwin Rivano, A.Md.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	DIII	Pengelola Asrama
59	Yahya Amarullah Taufik, S.Sos.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik
60	Muhlis Nova	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	SMA	Pengelola Penyelenggaraan Diklat
61	Bangkit Panji Anarogo, S.Pd., M.Pd.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Analisis Kurikulum Dan Pembelajaran
62	Fazlur Rahman El Islamy, S.Pd.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Pengelola Penyelenggaraan Diklat
63	Edwin Aditya Irawan, S.Psi.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Analisis monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
64	Siswantana Putri Rachmatika, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Pengolah Data Perkara dan Putusan
65	Mazmur Alexander Manik, S.Kom.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Pranata Komputer Ahli Muda
66	Rudi Kurniawan	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	DIII	Programmer
67	Titis Anindiyati, S.E., S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
68	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S3	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
69	Rizkisyabana Yulistayaputri, S.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda 02
70	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda 02
71	Sylvia Yuliani, S.E., M.E.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Analisis Rencana Program dan Kegiatan
72	Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S3	Pengolah Data Perkara dan Putusan
73	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
74	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
75	Muhidin, S.H., M.Hum.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Panitera
76	Adinda Rizky Putri Chaerunissa	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Sekretaris
77	Nahar Slamet, S.Kom.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
78	Widy Hastowahyudi, S.Kom.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Pranata Komputer Ahli Muda
79	Mery Christian Putri, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
80	Sigit Purnomo, S.I.P., M.M.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
81	Nur Rakhman, S.Kom.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Pranata Komputer Ahli Pertama
82	Achmad Dodi Haryadi, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Pengelola Persidangan
83	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
84	Fenny Tri Purnamasari, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Juru Panggil
85	Siska Yosephin Sirait, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Pengelola Persidangan
86	Muhammad Ramlan Aminuddin, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Analisis Hukum
87	Supriyanto, S.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Pengelola Persidangan
88	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Panitera Pengganti Tk. II
89	Sri Haryanti, S.Kom., MMSI.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Pranata Komputer Ahli Muda
90	Muhamad Aussie, S.Kom.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Pranata Komputer Ahli Pertama
91	Jeklin Indriani Br Purba, S.Kom.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Pranata Komputer Ahli Pertama
92	Muhammad Ridho Ihsan, S.Si.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Pranata Komputer Ahli Pertama
93	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S3	Panitera Muda II
94	Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S3	Panitera Pengganti Tk. II
95	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S3	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya
96	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S3	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
97	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S3	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
98	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S3	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
99	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S3	Pengolah Data Perkara dan Putusan
100	Rio Tri Juli Putranto, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Juru Panggil
101	M. Hairuddin	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Perawat Umum
102	Taufik Gunanda, S.Kom.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S1	Pranata Komputer Ahli Pertama
103	Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya
104	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda
105	Paulus Rudy Calvin Sinaga, S.H., M.H.	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Analisis Hukum
106	Yunita Nurwulantari, S.H., M.H.	Perempuan	Mahkamah Konstitusi RI	S2	Pengolah Data Perkara dan Putusan